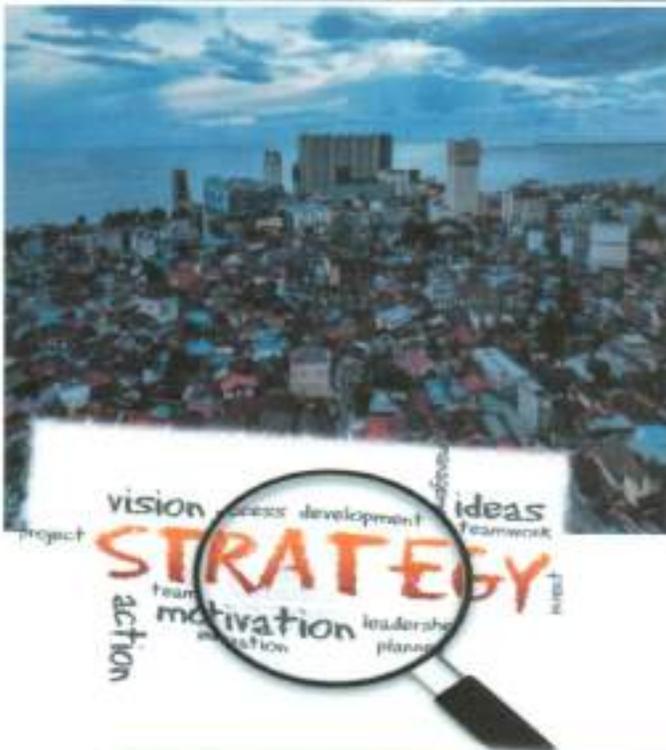




## RENCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

**KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas bimbinganNya, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan di Tahun 2024 sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Program Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Program Kegiatan pada Rancangan Akhir Renja 2025 ini mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan gambaran perubahan target kinerja tahun 2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Diharapkan dengan adanya Disperkim Kota Balikpapan, mampu memberikan kontribusi kepada Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Berkemajuan yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman".

Semoga Program Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman dengan prinsip memegang teguh disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran, serta berorientasi outcome serta peningkatan kualitas kinerja Badan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan selanjutnya.

Balikpapan, 05 Agustus 2024



## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR.....  | 1  |
| DAFTAR ISI .....   | 2  |
| BAB. I .....   | 3  |
| PENDAHULUAN.....   | 3  |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 3  |
| 1.2. Landasan Hukum .....  | 4  |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....   | 5  |
| 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. ....          | 6  |
| BAB. II.....   | 7  |
| HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....   | 7  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 7  |
| 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  | 51 |
| 2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah.....                            | 53 |
| 2.4 Review tentang Rancangan Akhir RKPD.....   | 80 |
| 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....   | 80 |
| BAB. III.....  | 81 |
| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....   | 81 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional.....  | 81 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran.....   | 82 |
| 3.2.1 Tujuan.....  | 82 |
| 3.2.2 Sasaran.....   | 82 |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....   | 84 |
| BAB. IV.....   | 86 |
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....  | 86 |

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa perlu dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD, RKPD, Renstra PD, hingga Renja PD.

Program Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan seperti yang tertuang dalam visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu :

#### ***VISI:***

***TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN  
DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN***

#### ***MISI:***

- 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik**
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi**
- 3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai**
- 4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan**
- 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif**

Pada misi tersebut urusan bidang perumahan dan permukiman terkait dengan misi ke-3 yaitu **“Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai”**. Badan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

Untuk dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih 2021-2026 , Disperkim Kota Balikpapan menyusun Rankhir Renja Tahun 2024 dikarenakan adanya review target kinerja yang di dukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan maka dilakukan perubahan terhadap Rankhir Renja Tahun 2024. Program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS Tahun 2024 digunakan sebagai dasar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
20. Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor 050/1014/Bappeda-Litbang Tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah :

- a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024;
- b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024;
- c. Menjadi landasan sarana pengendali program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Rankhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ini memberikan penjelasan mengenai perubahan target kinerja tahun 2024. Sistematika penyajian Rankhir Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Menjelaskan secara ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran kinerja Renja OPD, Program dan Kegiatan OPD, dan Menjelaskan secara ringkas perubahan program dan kegiatan OPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan secara ringkas tentang perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V. PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seumpama ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

## **BAB. II.**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Balikpapan. Adapun Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan diatur berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan beberapa hal. Berdasarkan hasil monitoring, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Renja Tahun 2024, selanjutnya dilakukan evaluasi Renja 2024 dengan realisasi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana terlampir:

a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 berdampak positif bagi kelancaran pencapaian tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman pada khususnya dan tersedianya pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman berdampak pada perlunya usaha yang lebih optimal dari seluruh sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Permukiman di tahun mendatang agar dapat mengejar ketertinggalan dalam pencapaian target Renstra.

b. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi berkala di tahun berjalan agar dapat menyesuaikan pendekatan terbaik dalam pencapaian tujuan program / kegiatan .
2. Peningkatan pemahaman perencanaan perangkat daerah ke dalam organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman agar dapat mengoptimalkan strategi /pendekatan pencapaian target kinerja. Peningkatan pemahaman perencanaan pada sumber daya yang ada di di Dinas Perumahan dan Permukiman juga di perlukan pada saat penentuan target kinerja. Ketidakhahaman terhadap perencanaan perangkat daerah, membuat penentuan target terlalu pesimis atau terlalu optimis. Hal ini akan berdampak pada nilai evaluasi perencanaan perangkat daerah.
3. Penguatan data dasar (baseline kinerja) pada perencanaan perangkat daerah dimasa mendatang. Optimalisasi anggaran hanya untuk pencapaian target kinerja dan bukan untuk hal aksesoris program/ kegiatan.

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan**

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan      | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|--|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8 =(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>   | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      | <b>IKM Layanan Administrasi Keuangan</b>   | <b>90</b>  | <b>77.08</b>   | <b>75</b>   | <b>77.39</b>                                  | <b>103.19</b>         | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 130  | 26   | 26  | 33  | <b>126.92</b>         | 45  | 45   | <b>34.62</b>                                 |
|          | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                   | <b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                           | <b>90</b>  | <b>73.93</b>   | <b>75</b>   | <b>74.32</b>                                  | <b>99.09</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                     | 45  | 45   | 0  |
|          | Bimbingan Teknis implementasi/peraturan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                     | 43  | 43   | 0  |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan      | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)            | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|--|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>                               | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | <b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>              | <b>90</b>  | <b>78.54</b>   | <b>75</b>   | <b>78.54</b>                                  | <b>104.72</b>         | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40   | 8  | 1   | 1   | 100                   | 1   | 10   | 25.00  |
|          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah jenis bahan Logistik kantor                                 | 5  | 56   | 4   | 4   | 100                   | 1   | 61   | 1220.00                                      |
|          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Penggandaan dan Penggandaan                                 | 10   | 15   | 2   | 2   | 100                   | 1   | 18   | 180.00                                       |
|          | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan           | Jumlah bahan bacaan  | 0  | 0  | 0   | 40  | -                     | 0   | 40   | 0.00   |
|          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah               | 195  | 87   | 40  | 181   | 453                   | 1   | 269  | 137.95                                       |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|---|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |   |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>   | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>    | <b>90</b>  | <b>88.07</b>   | <b>75</b>   | <b>76.39</b>                                  | <b>101.85</b>         | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 12   | 0  | 0   | 0   | 0                     | 3   | 3  | 25   |
|          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                | 25   | 12   | 6   | 25  | 416.67                | 5   | 42   | 168  |
|          | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                | <b>90</b>  | <b>77.12</b>   | <b>75</b>   | <b>75.01</b>                                  | <b>100.01</b>         | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 20   | 2  | 4   | 4   | 100                   | 1   | 7  | <b>35.00</b>                                 |
|          | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 20   | 12   | 4   | 4   | 100                   | 1   | 17   | <b>85.00</b>                                 |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|--|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8 =(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>   | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1100   | 12   | 12  | 12  | 100                   | 1   | 25   | <b>2.27</b>                                  |
|          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                 | <b>90</b>  | <b>73.54</b>   | <b>75</b>   | <b>74.32</b>                                  | 99.09                 | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 165  | 33   | 33  | 33  | 100.00                | 35  | 101  | 61.21  |
|          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10   | 2  | 2   | 2   | 100.00                | 2   | 6  | 60.00  |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |   |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8 =(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                              | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>  | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 35   | 6  | 111   | 111   | 100.00                | 111   | 228  | 651.43                                       |
|          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 5  | 1  | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 3  | 60.00  |
| <b>2</b> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>   | <b>Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</b> | <b>60.68</b>   | <b>0</b>   | <b>0.59</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>28</b>  | <b>46.14</b>                                 |
|          | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan   | 100  | 11.82  | 0.59  | 0   | 0                     | 0   | 28   | 28.00  |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|---|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |   |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8 =(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>   | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   | 6  | 6  | 0   | 0   | 0                     | 1   | 1  | 16.67  |
|          | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan  | Jumlah dokumen Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan   | 5  | 1  | 0   | 0   | 0                     | 0   | 1  | 20.00  |
|          | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana  | Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana  | 5  | 1  | 0   | 0   | 0                     | 0   | 1  | 20.00  |
|          | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 5  | 1  | 0   | 0   | 0                     | 1   | 2  | 40.00  |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|--|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>   | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat. Rumah Susun dan Rumah Khusus  | Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat. Rumah Susun dan Rumah Khusus   | 7  | 1  | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 3  | 42.86  |
|          | <b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah</b>                         | <b>2.84</b>  | <b>0</b>   | <b>0.59</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     |
|          | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana            | Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota | 800  | 0  | 100   | 100   | 100                   | 200   | 300  | 37.50  |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |   |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8 =(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>  | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP                  | 250  | 0  | 50  | 50  | 100.00                | 100   | 150  | 60.00  |
|          | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator                  | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0.00                  | 100   | 100  | 0.00   |
|          | Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 0  | 0  | 0   | 0   | 0.00                  | 35  | 35   | 0.00   |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |   |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8 =(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                            | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>  | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru Dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan            |  | 0  | 0   | 0   | 0                     | 100.00  | 100  | 0.00   |
|          | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | <b>2.84</b>  | <b>0</b>   | <b>0.59</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>1.42</b>   | <b>1.42</b>  | <b>50</b>                                    |
|          | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana  | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang direhabilitasi  | 32   | 0  | 5   | 0   | 0.00                  | 35  | 35   | 109.38                                       |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|--|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |  |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>  | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang disusun | 12   | 0  | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 2  | 16.67  |
|          | Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana  | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun  | 40   | 0  | 10  | 10  | 100.00                | 1   | 11   | 27.50  |
|          | <b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>  | <b>Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola</b>   | <b>81.38</b>   | <b>59.05</b>   | <b>70.83</b>  | <b>70.83</b>                                  | <b>100.00</b>         | <b>78.65</b>  | <b>79</b>  | <b>96.65</b>                                 |
|          | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun  | Jumlah rumah susun yang dikelola  | 9  | 6  | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 8  | 88.89  |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|---|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |   |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8 =(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>   | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  | Jumlah Kamar Rusunawa yang ter huni  | 625  | 437  | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 439  | 70.24  |
|          | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>   | <b>Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak</b>                          | <b>25</b>  | <b>4.39</b>  | <b>11.84</b>  | <b>89.04</b>                                  | <b>89.04</b>          | 13.16   | 107  | 426.34                                       |
|          | Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen rekomendasi siteplan  | 38   | 3  | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 5  | 13.16  |
|          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                     | Jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan | 86   | 86   | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 88   | 102.33                                       |
|          | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian                              | 1  | 0  | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 2  | 200.00                                       |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|--|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>   | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Perumahan  | Pembangunan dan Pengembangan Perumahan   |  |  |   |   |                       |   |  |  |
|          | Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KSPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | 4  | 0  | 0   | 0   | 0.00                  | 1   | 1  | 25.00  |
|          | <b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</b>  | <b>Jumlah rekomendasi teknis sarusun yang diterbitkan</b>  | <b>40</b>  | <b>0</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>                                     | <b>100.00</b>         | <b>10</b>   | <b>20</b>  | <b>50.00</b>                                 |
|          | Koordinasi dan Sinkronisasi iPenerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)                                | Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)  | 4  | 0  | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 2  | 50   |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                             | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|      |   |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8 =(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| 1    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     | IKM Internal Perangkat Daerah   | 90   | 77.29  | 75  | 72.55   | 96.73                 | 80  | 80   | 88.89  |
| 3    | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  | Luasan Kawasan Kumuh  | 0  | 100.88   | 74.4  | 96.89   | 130.23                | 24.4  | 24.4   | 72.49  |
|      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                 | Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman | 100  | 16.67  | 0   | 0   | 0.00                  | 50  | 50   | 50.00  |
|      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 24   | 0  | 0   | 0   | 0.00                  | 1   | 1  | 4.17   |
|      | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh                           | 153  | 52.42  | 78.90   | 56.41   | 71.50                 | 127.88  | 128  | 83.58  |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|---|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |   |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                          | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>   | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                  | Jumlah Dokumen Hasil Survey Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh yang disusun                               | 4  | 0  | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 2  | 50.00  |
|          | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun | 5  | 0  | 2   | 2   | 100.00                | 0   | 2  | 40.00  |
|          | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                       | Jumlah KSM/KPP yang dibentuk dan dibina  | 30   | 6  | 6   | 7   | 116.67                | 1   | 14   | 46.67  |
|          | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                      | Jumlah Diseminasi Informasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh                             | 36   | 0  | 0   | 0   | 0.00                  | 1   | 1  | 2.78   |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|--|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>   | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>                      | <b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>  | <b>100</b>   | <b>26.11</b>   | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b>                                 | 100.00                | 42.44   | 169  | 168.55                                       |
|          | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah dokumen peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh                                      | 24   | 4  | 1   | 1   | 100.00                | 0   | 5  | 20.83  |
|          | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   | Jumlah perbaikan RTLH  | 288  | 0  | 100   | 100   | 100.00                | 258   | 358  | 124.31                                       |
|          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                 | Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 51   | 0  | 0   | 0   | 0.00                  | 1   | 1  | 1.96   |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                      | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|--|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |  |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>   | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah masyarakat yang diberikan Bantuan uang sewa rumah tinggal                             | 200  | 0  | 0   | 0   | 0.00                  | 1   | 1  | 0.50   |
|          | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh   | Jumlah Luasan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan permukiman kumuh                  | 5.4  | 1.41   | 3.99  | 3.99  | 100.00                | 11.08   | 16   | 305.19                                       |
|          | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh  | Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh             | 10   | 3  | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 5  | 50.00  |
| <b>4</b> | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>  | <b>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau</b> | <b>0.12</b>  | <b>0.03</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0</b>   | <b>25.00</b>                                 |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|---|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |   |  |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8 =(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>   | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | <b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Jumlah Kawasan Yang dillakukan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh</b>  | <b>6</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | 0.00                  | 1   | 2  | 33.33  |
|          | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 252  | 70   | 0   | 0   | 0.00                  | 0   | 70   | 27.78  |
|          | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha  | Jumlah Kerjasama   | 3  | 0  | 0   | 0   | 0.00                  | 0   | -  | 0.00   |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)     | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |   |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8 =(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>                        | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah masyarakat penerima bantuan                          | 115  | 0  | 0   | 0   | 0.00                  | 0   | -  | 0.00   |
| <b>5</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>  | <b>Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan</b> | <b>2.78</b>  | <b>1.39</b>  | <b>2.14</b>   | <b>0.04</b>                                   | 2.00                  | <b>5.21</b>   | <b>5.21</b>  | 187.56                                       |
|          | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>   | <b>Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara</b>       | <b>7</b>   | <b>3</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b>                                      | 100.00                | 1   | 5  | 71.43  |
|          | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan  | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan         | 7  | 3  | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 5  | 71.43  |

| Kode     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|----------|--|---|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
|          |  |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8 =(7/6)              | 9   | 10=(5+7+9)   | 11= (10/4)                                   |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                 | <b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>  | <b>90</b>  | <b>77.29</b>   | <b>75</b>   | <b>72.55</b>                                  | <b>96.73</b>          | <b>80</b>   | <b>80</b>  | <b>88.89</b>                                 |
|          | Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian         | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 26   | 3  | 3   | 3   | 100.00                | 3   | 9  | 34.62  |
|          | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Perumahan                         | 60   | 12   | 1   | 1   | 100.00                | 1   | 14   | 23.33  |

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**I.** Sasaran strategis Meningkatkan cakupan rumah layak huni tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Indikator kinerja program pengembangan perumahan adalah Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota. Target kinerja tahun 2023 sebesar 0.59%. Pada tahun 2023, realisasi indikator program ini adalah sebesar 0%. Formulasi indikator sub kegiatan ini adalah untuk menunjang penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program sesuai pelayanan yang diwajibkan oleh Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat. Pada Tahun 2023 tidak terdapat fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena bencana dan relokasi program pemerintah kabuapten/kota, karena tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana namun telah dialokasikan anggaran dalam DPA Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 untuk program tersebut.

Tingkat capaian anggaran program pengembangan perumahan mencapai 77.38% dari pagu anggaran Rp.7.904.553.500,- dan terealisasi Rp. 6.116.719.568,-

Program pengembangan perumahan terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat. Target kinerja kegiatannya adalah persentase rumah yang telah dilakukan pendataan sebesar 27.58 % dengan capaian 100%. Nilai target merupakan rumusan dari perencanaan terhadap rumah yang dilakukan pendataan sebanyak 700 unit rumah dibandingkan dengan 2.538 unit rumah di lokasi kelurahan Gunung sari ulu, Baru ulu dan Prapatan yang mencukupi untuk pemetaan rumah di lokasi rawan bencana dan relokasi di Kota Balikpapan.

Realisasi target kinerja adalah 0% dikarenakan pada tahun 2023 pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan output kinerja berupa Legalisasi dokumen (Naskah Akademik). Namun pada tahun 2023 telah terdapat pendataan rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan penanganannya sebanyak 14.074 unit dengan rincian 7.146 unit pada daerah risiko bencana longsor, 4.898 unit pada daerah risiko rawan abrasi, 2.0230 unit pada daerah

resiko kebakaran hutan. Capaian realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar 96.60 % dari anggaran Rp.25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.900.000,- .

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa sub kegiatan diantaranya :

1) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus. Realisasi keuangan

Sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 96.60 % dari anggaran Rp.25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.900.000,- . Sisa anggaran merupakan sisa kontrak Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Naskah Akademik Perda RP3KP.

Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan target 1 dokumen dan capaian target 100%

b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota adalah persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah. Target Renja perubahan tahun 2023 adalah sebesar 0,59 %. Target ini memiliki formulasi jumlah masyarakat yang bersedia menerima bantuan rumah korban bencana atau relokasi berdasarkan jumlah rumah korban bencana/relokasi yang disediakan dibandingkan dengan jumlah data rumah By Name By Address (BNBA) yang harus berikan bantuan rumah korban bencana/relokasi atau target 15 rumah tangga dibagi jumlah total rumah yang betrada pada rawan bencana sebanyak 2538. pada tahun 2023 Tidak terdapat penyediaan bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah korban bencana serta bantuan relokasi dikarenakan tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana, sehingga realisasi target masyarakat yang bersedia di berikan bantuan adalah 0. Kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 89.29% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.126.650.000,- dari anggaran sebesar Rp.113.090.560,-.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

1) Sub kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota. Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja 100%, dari target 100 orang. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat atau Sukarelawan tanggap bencana sudah terealisasi pada 15 Juni 2023. Sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 92,77 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp.59.700.000,- dari anggaran sebesar Rp.55.383.600, . Sisa anggaran merupakan sisa Belanja Cetak dan Penggandaan Sosialisasi Standar Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

2) Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

Sub kegiatan ini mempunyai indikator jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP, dengan target 50 orang dan capaian 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar 86.19% atau realisasi sebesar Rp. 57.706.960 dari target Rp.66.950.000,-. Terdapat sisa anggaran belanja Kelengkapan Peserta Sosialisasi KPR-FLPP, belanja honorarium dan transportasi akomodasi Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 0.59% namun realisasi 0% dikarenakan tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana di tahun 2023. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 24.45% atau Rp. 196.792.668,- dari target anggaran Rp. 805.000.000, dengan kategori sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya realisasi rehabilitasi rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana.

Adapun kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang terehabilitasi dengan target 5 unit namun terealisasi 0 dikarenakan tidak adanya realisasi rehabilitasi rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana sehingga realisasi anggaran hanya 10.83% yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja kertas cover , bahan komputer dan belanja cetak penggandaan.

2) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. Realisasi anggaran sebesar 98,35% dari target Rp. 100.000.000 atau sebesar Rp.98.354.880.

3) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun dengan target 10 unit namun terealisasi 0 dikarenakan tidak adanya realisasi pembangunan rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana sehingga realisasi anggaran sebesar 15,68 % dari total target Rp.455.000.000 yang terdiri dari belanja pedukung saja seperti belanja alat tulis kantor, belanja kertas cover , bahan komputer dan belanja cetak penggandaan, dan telah tersusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perwali Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dampak Bencana namun belum ditetapkan.

#### **d. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**

Indikator kegiatan ini adalah persentase hunian rusun milik pemerintah kota yang terkelola. Target kegiatan ini adalah sebesar 70,83%. Target ini didapat dari rumusan target hunian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terisi sebanyak 544 hunian terhadap keseluruhan hunian di 9 rusunawa milik Pemerintah Kota Balikpapan sebanyak 768 kamar. Realisasi dari target ini adalah sebesar 59,05 % didapat dari terisinya 489 hunian teradap keseluruhan hunian rusunawa yang tersedia. Evaluasi yang dilakukan terkait tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang rusunawa dan terdapat rusunawa yang tidak layak di huni karena kondisi lahan yang berbahaya atau miring. Adapun Capaian realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar 77,25%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.6.092.903.500,- dan terealisasi sebesar Rp.5.009.983.993.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. Jumlah rumah susun yang dikelola dengan target 4 (empat) unit rusunawa yang fisiknya dilakukan peningkatan dan pemeliharaan terealisasi pemeliharaan dan peningkatan sebanyak 6 (lima) unit rusunawa yang terdiri atas rusunawa Sepinggan I, Sepinggan II, Perusda, Sumber, Siaga dan Km 7. Realisasi keuangan anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah sebesar Rp. 3.764.814.399 dan terealisasi sebesar Rp.4.272.903.500 dengan capaian realisasi sebesar 88.11%. anggaran yang terserap kurang optimal karena kurangnya Peningkatan dan Supervisi Peningkatan Rusun Sumber.

2) Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. Berdasarkan data keterisian hunian jumlah kamar rusunawa yang terhuni dengan target kamar terhuni sebanyak 544 kamar. Realisasi dari target ini adalah terisinya 489 hunian terhadap keseluruhan hunian rusunawa yang tersedia. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang rusunawa dan terdapat gedung rusunawa yang dalam kondisi tidak layak huni karena kondisi tanah yang miring yaitu Rusunawa Manggar yang dapat membahayakan jika dihuni. Realisasi keuangan sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 68.42% yang didapat dari perhitungan realisasi keuangan Rp. 1.245.169.594 terhadap anggaran sebesar Rp. 1.820.000.000,. Anggaran yang tidak terserap optimal adalah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rusunawa, Belanja Perabot Kantor Rusunawa, Belanja Pakaian Dinas Lapangan, Belanja Internet Rusunawa, Belanja Insentif tenaga Operasional dan tenaga keamanan non ASN Rusun serta sisa belanja rutin gaji tenaga non ASN Rusunawa.

#### **e. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.**

Kegiatan ini memiliki indikator persentase perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak. Target indikator kegiatan ini adalah sebesar 11.84% yang didapat dari 27 perumahan yang sesuai rencana tapak terhadap 228 perumahan yang ada di kota Balikpapan. Realisasi kegiatan sampai dengan tahun ini adalah jumlah perumahan sesuai rekomendasi rencana

tapak yang diberikan adalah 10 perumahan yaitu *baseline* 2021 terdapat 7 perumahan sesuai rencana tapak dan 3 perumahan sesuai rencana tapak yang diterbitkan. Pada tahun 2023 ada 6 rekomendasi teknis yang diterbitkan. Sehingga capaian kinerja sebesar 7,02 %. Ketidaktercapaian target dikarenakan dilakukannya pengetatan kriteria dalam rekomendasi rencana tapak dalam usaha mendukung pengendalian banjir Kota Balikpapan. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 728.128.547 dari anggaran sebesar Rp.805.000.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 90.45%. Kegiatan ini memiliki beberapa sub kegiatan , diantaranya adalah:

1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan target 1 dokumen dan realisasi 100%. Capaian indikator ini adalah 100%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 575.276.127,- dari anggaran sebesar Rp.650.000.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 88.50%. Terdapat belanja yang realisasinya 0 yaitu Belanja Cetak Dan Penggandaan, Perlengkapan Peserta Sosialisasi Sertifikasi Pengembang Pengembangan Perumahan, Fotocopy Dokumen Rekomendasi Siteplan Perumahan, Dokumentasi Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Sektor Perumahan, Sosialisasi Sertifikasi Pengembang - Dokumentasi Pengembangan Perumahan Belanja Cetak HAPERNAS 2023, Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan dan Lingkungan (Piagam/Sertifikat), Bendera Beraneka Warna Hapernas 2023, Fotocopy Materi Peningkatan Kualitas Ruang Kota melalui Konektivitas Kawasan Perumahan, Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan dan Lingkungan (Seminar Kit), Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan dan Lingkungan (Standing Banner), Pembahasan Dokumen Siteplan Perumahan, Peninjauan Lokasi Permohonan Siteplan Perumahan, Seragam Lapangan, Transportasi dan Akomodasi Narasumber Rapat Kerja Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan, dan Honorarium Hapernas 2023.

2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan umum/rumah susun umum dengan target 1 dokumen dan

realisasi sebesar 100%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 152.852.420,- dari anggaran sebesar Rp.155.000.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 98.61%. Terdapat belanja dengan realisasi rendah yaitu belanja Fotocopy Dokumen Penyusunan (Review) Siteplan Perumahan PNS Km 7,5.

#### **f. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).**

Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Rekomendasi Teknis Sarusun yang diterbitkan. Target indikator kegiatan ini adalah sebesar 10 unit dengan realisasi 0. Ketidaktercapaian target dikarenakan. Tidak terdapat penerbitan SKGB. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.43.823.800 dari anggaran sebesar Rp.50.000.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 87.65%.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) dengan target 1 dokumen dan realisasi 100%. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.43.823.800 dari anggaran sebesar Rp.50.000.000,- atau memiliki capaian keuangan sebesar 87.65%. Terdapat belanja yang realisasinya sedang yaitu Belanja Cetak dan Penggandaan SKGB dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat SKGB.

## **II. Sasaran Strategis Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai,** tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

### **1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).**

Program ini memiliki indikator persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan dengan target kinerja 2.08 % yang didapat dari 6 perumahan terhadap 288 jumlah lingkungan perumahan dan terealisasi 100%. Berdasarkan pemutakhiran data perumahan tahun 2023, terdapat 140 perumahan. Realisasi keuangan program ini adalah sebesar 94.70% dimana realisasi keuangan adalah Rp.4.692.025.137,- dari anggaran Rp.4.954.855.500. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

#### **a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan memiliki indikator kinerja jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara dengan target 1 Ha dan terealisasi 100%. Capaian keuangan kegiatan ini adalah sebesar 94.70 % dimana realisasi keuangan adalah Rp.4.692.025.137 dari anggaran Rp.4.954.855.500,-.

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu:

1) Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan penyediaan psu perumahan yang disusun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100% dengan menghasilkan dokumen revisi Perda 5 Tahun 2013 , dokumen pendataan PSU Perumahan se Kota Balikpapan dan dokumen perencanaan penyediaan taman serta dilaksanakan sosialisasi penyerahan PSU Perumahan. Realisasi keuangan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 87.05% , yaitu dari anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.87.046.945,-. Terdapat belanja dengan kriteria sangat rendah yaitu belanja Honorarium Narasumber Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan, belanja Transportasi dan akomodasi Narasumber Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan.

2) Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Indikator sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian adalah Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang Fungsi Hunian. Target kinerja tahun 2023 adalah 3 lokasi Pekerjaan. Telah dilaksanakan pada 5 titik lokasi PSU di,Cluster Denhag, Cluster Pesona Cuontry , Cluster Arizona,dan terealisasi 100%. Capaian realisasi keuangan sebesar 94.96 % , yaitu dari anggaran Rp.4.581.643.292,- dan terealisasi sebesar Rp.4.824.855.500,-. Terdapat realisasi belanja yang tidak terealisasi yaitu belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan Sub Kegiatan Penyediaan PSU Perumahan dan terdapat belanja dengan kriteria sedang yaitu belanja Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi PSU Perumahan dan Konsumsi Rapat Sub Kegiatan Penyediaan PSU Perumahan.

3) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, dengan target kinerja 1 laporan dan terealisasi 100%. Capaian realisasi keuangan sebesar 77,78 %, yaitu dari anggaran Rp. 23.334.900,- dan terealisasi sebesar Rp.30.000.000,-. Terdapat belanja yang tidak terealisasi yaitu Honor Panitia Tim Verifikasi PSU dan belanja dengan kriteria capaian sedang yaitu Konsumsi Aktivitas Lapangan Koordinasi dan Sinkronisasi PSU.

### **III. Sasaran strategis Mengurangi luas kawasan kumuh,**

Sasaran ini tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Program Kawasan Permukiman.**

Berdasarkan SK Walikota Balikpapan nomor 188.45-326/2020 tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan menyatakan bahwa luasan kumuh kota Balikpapan adalah 153,3 Ha. Program ini memiliki sasaran untuk mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 Ha pada tahun 2026 dengan berbagi kewenangan pengurangan dengan Kementrian (Pusat) untuk pengurangan diatas 15 ha dan Provinsi Kalimantan Timur untuk pengurangan 10 -15 Ha. Berdasarkan pemetaan pada saat penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah pengurangan kawasan kumuh Kelurahan Damai seluas 5,4 Ha. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk penanganan kumuh sebesar 3.99 Ha dimana di tahun 2022 luasan kawasan kumuh yang telah tertangani seluas 1,41 Ha sehingga target 2023 seluruh luasan kumuh di bawah 10 Ha dapat tertangani dan luasan kumuh Kota Balikpapan menjadi 74.40 Ha. Adapun realisasi kinerja luasan kumuh Kota Balikpapan menjadi 96.89 Ha atau kurang dari target 74.40, hal ini karena tidak adanya intervensi penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha. Pada tahun 2023 terbit Kembali SK kumuh baru seluas 104.69 Ha berdasarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan, bahwa terdapat penetapan jumlah lokasi dan luasan berdasarkan kegiatan RP2KPKPK Tahun 2022. Realisasi keuangan program ini adalah Rp.3.981.926.232,- dari anggaran sebesar Rp.4.165.648.800,- dengan capaian sebesar 87.65%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Luasan (ha) Penanganan infrastruktur Kawasan Kumuh dengan target 78.9 Ha, hal ini dikarenakan tidak adanya intervensi penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha. Realisasi kegiatan ini adalah sebesar 56,41 Ha atau capaian sebesar 71,50 %. Realisasi keuangan ini adalah sebesar Rp. 641.392.061 dari target Rp.679.354.300 atau terealisasi 94,41%.

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Realisasi keuangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Hasil Survei dan Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1dokumen dengan capaian 100%. Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 55.646.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.195.300,- dengan capaian realisasi 99.19%.

2) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan target 2 dokumen dan realisasi capaian 100%. Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 524.699.600 dan terealisasi sebesar Rp. 489.740.261,- dengan capaian realisasi 93.34%. Terdapat belanja yang tidak terealisasi yaitu Alat Tulis Kantor, fotocopy, cetak, rapatKegiatan Rapat Kerja POKJA PKP.

3) Sub kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Pemukiman Kumuh dengan target 7 laporan yang merupakan 7 laporan kelurahan kumuh dan realisasi capaian 100%.

Sub kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 96.456.500,- dan terealisasi sebesar Rp.99.008.700,- dengan capaian realisasi 97.42%. Terdapat belanja dengan kriteria capaian rendah yaitu Belanja Barang Cetak untuk Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh.

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani dengan target tahun 2023 sebesar 100 % yang didapat dari jumlah Luas Kawasan Kumuh dibawah 10

ha yang ditangani tahun 2022 seluas 1,41 Ha dan tahun 2023 seluas 3.99 Ha terhadap 5,4 Ha kawasan kumuh di bawah 10 ha di Kelurahan Damai. Realisasi kinerja kegiatan ini adalah 100%. Anggaran yang terserap dari kegiatan ini adalah Rp. 3.340.534.171,- dari Rp. 3.486.294.500,- atau capaian 95.82%.

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Rencana Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan target 1 dokumen DED & Site Plan Penanganan Kumuh kelurahan Karang Rejo dan terealisasi 100 %. Capaian realisasi keuangan sebesar 99,06% atau Rp. 102.155.600,- dari target keuangan sebesar Rp. 103.128.500,-. Terdapat belanja yang tidak terealisasi yaitu Fotocopy untuk Kegiatan Peninsulas Dokumen Site Plan dan DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.

Indikator jumlah Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar Kumuh dengan target kinerja 3.99 Ha dan terealisasi 100%. Penanganan dilakukan di RT. 01 Kelurahan Damai. Sub kegiatan ini memiliki capaian realisasi keuangan senilai 86,58% atau dari anggaran Rp. 1.001.909.800,- terealisasi sebesar Rp.867.444.541,-. Terdapat belanja yang tidak terealisasi yaitu Pengadaan Barang untuk Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai.

3) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Indikator sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah Jumlah Rumah Tidak Layak yang Diperbaiki dengan target 100 unit dan terealisasi 100%.

Sub kegiatan ini memiliki capaian keuangan senilai 99,63% atau Rp. 2.294.869.680,- dari target anggaran sebesar Rp.2.202.388.000,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi pembelian alat tulis kantor dan makan minum rapat.

4) Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh.

Indikator sub kegiatan Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh adalah Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh

yang Terverifikasi dengan target 1 dokumen verifikasi Sepinggian Raya dan terealisasi 100% dengan tersedianya dokumen pendataan RTLH tahun 2023, pemuktahiran data RTLH tahun 2023 dan verifikasi kawasan kumuh.

Sub kegiatan ini memiliki capaian keuangan senilai 97.68% atau Rp. 76.064.350,- dari target anggaran sebesar Rp.77.868.200,-. Anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi pembelian alat tulis kantor dan makan minum rapat.

#### 2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Pada tahun 2023 tidak terdapat Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dalam renja dan DPA tahun 2023. Program ini memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Target kinerja pada tahun 2023 dalam Renstra Disperkim Tahun 2021-2026 adalah 0,01% dari formulasi 26 peningkatan kualitas RTLH terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan sejumlah 202.539 unit (baseline Renstra Disperkim Tahun 2021-2026). Program ini dilaksanakan di tahun 2022 dengan realisasi sebesar 0.033% atau realisasi jumlah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni diluar SK kumuh sebanyak 66 unit. Adapun target sampai dengan tahun 2026 adalah 0.12% atau 252 unit rumah terhadap 202539 unit rumah. Program ini dilaksanakan di tahun 2022 dengan realisasi sebesar 0.033% atau realisasi jumlah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni diluar SK kumuh sebanyak 66 unit. Realisasi keuangan program ini adalah 96,08% atau Rp.1.558.037.500,- terealisasi Rp.1.497.019.284,-.

#### **IV. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

**Sasaran ini** tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 adalah IKM Internal Perangkat Daerah dengan target kinerja 75 dan terealisasi sebesar 76.50. Realisasi skor 76.50 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Target kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang dikeluarkan oleh Inspektorat yaitu sebesar 75 dan terealisasi 72.55 dengan tingkat capaian kinerja 96.73%. Indikator kegiatan ini telah ditarik menjadi indikator sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Nomor 060.4/01799/Org tanggal 22 Desember 2023 Perihal Penyusunan Pejanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Kegiatan ini tidak memiliki anggaran.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan Disperkim (Renstra dan Renja, Renja Perubahan) yang disusun dengan target 2 dokumen yaitu dokumen Renja Tahun 2023 Renja Perubahan 2023.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 20223 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun dengan target 1 dokumen yaitu dokumen LKJIP Tahun 2022 dan terealisasi 100%.

3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi keuangan:

Sub kegiatan ini tidak memiliki anggaran. Tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun dengan target 2 dokumen yaitu dokumen LKJIP Tahun 2022 dan dokumen evaluasi renja sehingga terealisasi 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah skor IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Disperkim sebesar 75 dan terealisasi dengan nilai 77,39 dengan tingkat capaian 103.19 % di akhir

Desember 2023. Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terhadap layanan internal keuangan Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Realisasi skor 77,39 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal keuangan Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah sebesar Sementara itu realisasi keuangan sebesar Rp. 5.686.420.901 dari pagu sebesar Rp. 7.127.990.000 dengan tingkat capaian 79,78%.

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN dengan target sebanyak 26 orang dan terealisasi sebanyak 33 orang dan terealisasi 126,%. Terdapat realisasi anggaran sebesar 79,78% dari pagu anggaran Rp.7.127.990.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.686.420.901. Ketidaktercapaian realisasi keuangan terjadi karena P3K bekerja dan pembayaran gajinya mulai dibayarkan pada triwulan IV tahun 2023.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target skor 75 dan sesuai hasil IKM yang dilakukan didapat skor sebesar 78,54 dengan capaian 104,72%. Realisasi skor 78,54 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal administrasi umum memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada TA.2023 adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 1 paket dan terealisasi sebesar 100% berupa pembelian komponen instalasi listrik/alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) yang digunakan untuk penerangan bangunan kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023. Realisasi anggaran sebesar 98,44% dari

anggaran Rp. 14.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.741.000,-. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga penawaran.

#### 2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan logistik kantor yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target sebanyak 4 paket dan terealisasi 5 paket atau capaian 125 %. Hal ini dikarenakan target kinerja dalam renja perubahan tidak dirubah. Realisasi anggaran sebesar 89 % dari pagu anggaran Rp.365.869.200,-dengan realisasi sebesar Rp. 325.608.300,-. Terdapat belanja yang tidak terealisasi yaitu Konsumsi Rapat Dengan Pihak Lain/Jamuan Tamu dan realisasi belanja dengan kriteria rendah yaitu Konsumsi Harian Pegawai, Konsumsi Rapat Struktural dan JFT (Perubahan), dan belanja natuna.

#### 3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 2 paket dan terealisasi 4 paket atau capaian 200%. Hal ini dikarenakan target kinerja dalam renja perubahan tidak dirubah. Realisasi anggaran sebesar 90.92% dari pagu anggaran Rp.104.972.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.437.000,-. Terdapat realisasi belanja yang belum optimal yaitu Cetak Spanduk Hari Peringatan dan belanja penggandaan.

#### 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi sebesar 181 laporandari target 40 laporan dengan tingkat capaian 452.50%. Hal ini dikarenakan target kinerja dalam renja perubahan tidak dirubah. Realisasi keuangan sebesar 99.62 % dari pagu anggaran sebesar Rp.460.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 458.246.492,-.

#### d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 75 dan terealisasi melebihi target dengan nilai sebesar 76.39 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 101.85 %. Realisasi nilai 76.39 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pengadaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan

kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp.1.140.983.800,- dan terealisasi sebesar Rp.1.162.275.400,- dengan capaian 98.17%.

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target kinerja 6 paket dan terealisasi sebanyak 14 paket dengan tingkat capaian kinerja 416.67%. Dalam DPPA Tahun 2023 terdapat alokasi anggaran untuk 14 Unit pengadaan (cctv, intertive display (5 unit), AC 1.5 (2 unit), PC =6, Laptop=1, tablet=1, printer=6, switch hub=2, penangkal petir 1 namun target kinerja dalam renja perubahan tidak dirubah.

Pagu anggaran sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah 1.162.275.400,- dan terealisasi sebesar Rp.1.140.983.800,- dengan tingkat capaian 98.17%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga penawaran.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja skor IKM sebesar 75 dan terealisasi 75.01 dengan tingkat capaian 100.01 %. Realisasi skor 75.01 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal penyediaan jasa penunjang Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan dari kegiatan ini memiliki tingkat capaian 82,32 % dari anggaran Rp. 979.502.368,- dan terealisasi sebesar Rp.806.368.680,-.

Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 4 laporan yang merupakan pengiriman paket dokumen atau barang dan juga pembelian benda pos materai. Adapun realisasi kinerja hingga tanggal 31 Desember 2023 adalah 4 laporan atau pertriwulan dengan capaian 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan tingkat capaian 100 %.

2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Target kinerja sebanyak 4 laporan. Realisasi kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah 100 % atau 4 laporan yang dilaporkan per triwulan.

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebesar Rp. 125.785.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.593.000,- dengan tingkat capaian 75.20%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan anggaran yang tadinya akan digunakan untuk pembayaran tagihan listrik ketika dilakukan penambahan daya listrik. Ketidakstabilan aliran daya listrik ternyata tidak perlu diselesaikan dengan penambahan daya dan hal ini merupakan hasil koordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ketidakstabilan tersebut diatasi dengan pengaturan aliran listrik.

Dari sisi kinerja

3) Sub kegiatan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebesar Rp.848.717.368,- dan teralisasi sebesar Rp. 706.775.680,- dengan tingkat capaian sebesar 83.28%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan kelebihan penganggaran pada jasa tenaga bantu non ASN dimana terdapat kekosongan posisi tenaga bantu non ASN.

Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengantarget 12 laporan. Indikator ini terealisasi 100%. Sub kegiatan bertujuan untuk menyediakan bahan peralatan kebersihan, jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor dan jasa tenaga bantu administrasi non ASN yang dilaporkan per bulan.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 75 dan terealisasi melebihi target dengan skor sebesar 74,32 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 99.09 %. Realisasi skor 74.32 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pemeliharaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Pagu

anggaran kegiatan ini sebesar Rp 783.174.250 dan teralisasi sebesar Rp. 551.745.793 dengan capaian 70,45%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 33 unit kendaraan baik R2 maupun R4 yang dipegang oleh perorangan maupun jabatan. Realisasi target kinerja hingga akhir Desember 2023 adalah 29 unit kendaraan atau terealisasi 87.88%. hal ini dikarenakan terdapat 4 unit kendaraan jabatan dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat dilakukan perbaikan.

Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah sebesar Rp 227.193.848,- dari anggaran sebesar Rp.380.769.750,- atau sebesar 59.67% dengan kriteria sangat rendah. Ketidaktercapaian realisasi keuangan dikarenakan kurang terjadwalnya pemeliharaan servis dan pembelian suku cadang kendaraan jabatan.

2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 2 unit dan terealisasi 2 unit kendaraan atau 100%.

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah sebesar Rp. 115.157.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.797.088,- dengan tingkat capaian adalah 68,43 % atau kriteria capaian rendah Ketidaktercapaian realisasi keuangan disebabkan karena kurangnya penjangaan servis dan pembelian suku cadang kendaraan operasional atau lapangan.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 7 unit kendaraan dan terealisasi sebanyak 111 unit peralatan

mesin yang dipelihara dengan realisasi 87 unit atau tingkat capaian 78.38%. Hal ini dikarenakan pemeliharaan mesin absen, ac, komputer, printer dan jaringan internet dengan kondisi peralatan dan mesin dalam keadaan baik sehingga tidak memerlukan banyak perawatan dan masih sebagian unit masih dalam masa garansi.

Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah sebesar Rp. 87.247.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.839.250,- dengan tingkat capaian 54,83% atau kriteria capaian sangat rendah. Ketidaktercapaian realisasi keuangan karena lebihnya penganggaran untuk pemeliharaan mesin absensi yang masih dalam kondisi baru dan belum memerlukan pemeliharaan serta peralatan dan mesin yang lainnya masih dalam kondisi baik dan tidak memerlukan perbaikan. Terdapat realisasi belanja dengan kriteria sangat rendah yaitu belanja Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Komputer dan Laptop dan Suku Cadang Genset Gedung Kantor.

#### 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi dengan target 1 unit gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan terealisasi 100% yaitu 1renovasi gedung kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah sebesar Rp.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 197.915.607,- dengan tingkat capaian 98.96%. Ketidaktercapaian realisasi keuangan merupakan selisih harga penawaran

## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM yang harus diacu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan

Minimal Pekerjaan Umum. SPM Perumahan Rakyat yang diampu oleh Disperkim Kota Balikpapan, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

2. Jenis Pelayanan Dasar, terdiri atas:
  - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3. Mutu Pelayanan Dasar, terdiri atas :
  - a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana /kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
  - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
  - d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
  - e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
  - f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
4. Penerima Pelayanan terdiri atas:
  - a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
  - b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*) dan Indikator Kinerja Hasil (IKK *Outcome*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 20 IKK *Output* dan 5 IKK *Outcome*.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

a. **Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Utama Perangkat Daerah**

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023**

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja   | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|---|--------|--------|-----------|---------|
|    | Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas        | Persentase Permukiman Layak Huni                              | Persen | 99,32  | 99,11     | 99,79   |
| 1  | Meningkatnya cakupan rumah layak huni                          | Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni               | Persen | 99.83  | 99.83     | 100.00  |
| 2  | Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. | Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU | Persen | 14.5   | 12.18     | 84      |
| 3  | Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh                                | Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh                    | Persen | 51.47  | 36.80     | 71.49   |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja     | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|-----------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 4  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai Sakip DISPERKIM | Nilai  | 75     | 72.55     | 96.73   |

Pada table 2.2 diperoleh pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator tujuan dan indicator kinerja utama pada sasaran strategis dengan realisasi capaian sebagai berikut:

- 1. Tujuan " Meningkatkan Infrastrukturnya yang Terpadu dan Berkualitas,** dengan indikator '**Persentase Permukiman Layak Huni**, terdapat realisasi sebesar 99,11% dari target 99,32% atau capaian sebesar 99,79% dengan **kriteria" Sangat Tinggi"**.
- 2. Sasaran I " Meningkatkan cakupan rumah layak huni"**, dengan Indikator '**Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni"**, dengan realisasi sebesar **99,83** dari target **99,83** sehingga capaian sebesar **100%** dengan **kriteria" Sangat Tinggi"**
- 3. Sasaran II " Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai" dengan Indikator "Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU"**, terdapat realisasi sebesar **12,18%** dari target **14,5%** atau capaian sebesar **84%** dengan **kriteria " Tinggi"**.
- 4. Sasaran III" Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh" dengan Indikator 'Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh**, terdapat realisasi sebesar **36.80%** dari target **51,47%** atau capaian sebesar **71,49%** dengan **kriteria " Tinggi"**.
- 5. Sasaran IV 'Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah'**, dengan realisasi sebesar **72,55** dari target **75** sehingga capaian sebesar **96,75%**, dengan **kriteria "Sangat Tinggi"**.

Berdasarkan analisis capaian setiap indikator maka dapat dijelaskan untuk Tujuan " Meningkatkan Infrastrukturnya yang Terpadu dan Berkualitas, dengan indikator 'Persentase Permukiman Layak Huni, terdapat realisasi sebesar 99,11% dari target 99,32% atau capaian sebesar 99,79% dengan kriteria" Sangat Tinggi". Hal ini didukung oleh capaian kinerja kegiatan dalam Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian. Terdapat 11 Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 yaitu: 1.Kelurahan Karang Rejo 2. Kelurahan Karang Jati 3. Kelurahan Gunung Sari Ulu 4. Kelurahan Sumber Rejo 5. Kelurahan Sungai Nangka 6. Kelurahan Baru Ilir 7. Kelurahan Manggar Baru 8. Kelurahan Karang Joang 9. Kelurahan Damai 10. Kelurahan Prapatan 11. Kelurahan Klandasan Ilir.

Pada capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi", namun hanya 1 (satu) indikator yang mencapai target 100%.

Adapun capaian yang belum 100% adalah sebagai berikut:

1. Pada sasaran II kriteria kinerja "sangat tinggi" namun belum tercapai 100% karena masih banyaknya PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan data, baru sebesar 4963 unit rumah dalam perumahan atau 3 perumahan yang difasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan dari 40,152 unit rumah.
2. Pada sasaran III diperoleh kriteria penilaian realisasi kinerja "sedang" atau belum tercapai karena capaian penanganan Kawasan kumuh untuk di target 2023 sebesar 3,99 sudah tercapai namun masih terdapat kawasan kumuh di atas 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pada tahun 2023 hanya terdapat penanganan dari Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun penanganan kumuh tahun 2023 berupa Pekerjaan Penanganan Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan berupa Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman, Perbaikan saluran Drainase, dan Jalan Lingkungan. Pada tahun 2023 terdapat luasan kawasan kumuh baru sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan.

Pada sasaran IV tidak tercapai 100% karena nilai LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2022 mengalami penurunan yang semula tahun 2021 sebesar 74,57 di tahun 2022 menjadi 72,55.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran                               | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  |
|----|---------------------------------------|--|--|
| 1  | Meningkatnya cakupan rumah layak huni | 1 Adanya kerja sama dengan perangkat daerah dan instansi terkait | 1 tidak terdapat fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena bencana dan relokasi program pemerintah kabuapten/kota, karena tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana. |
|    |                                       | 2 Tersusunnya Pembuatan Naskah Akademik Perda RP3KP              | 2 Belum disusunnya SPM Urusan perumahan  |

| No | Sasaran | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   |
|----|---------|---|---|
|    |         | 3<br>Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana                         | 3<br>belum ada SK Penetapan Bencana yang dijadikan dasar untuk memberi bantuan atau fasilitas rumah korban bencana dan atau relokasi korban pemerintah.   |
|    |         | 4<br>Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP   | 4<br>Belum tersedianya data perumahan dan data rumah di kawasan rawan bencana yang ter-update secara periodik   |
|    |         | 5<br>adanya kerjasama dengan Fasilitator Lapangan (TFL) Rehabilitasi dan pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana  | 5<br>Banyak calon penerima belum memenuhi kriteria dikarenakan status lahan dan bangunan  |
|    |         | 6<br>Tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perwali Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Dampak Bencana  | 6<br>pada tahun 2023 pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dengan output kinerja berupa Legalisasi dokumen (Naskah Akademik),  |
|    |         | 7<br>Tersusunnya Site Plan / DED Bagi Rumah Korban Bencana  | 7<br>belum ada SK Penetapan Bencana yang dijadikan dasar untuk memberi bantuan atau fasilitas rumah korban bencana dan atau relokasi korban pemerintah.   |
|    |         | 8<br>Adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun   | 8<br>belum sesuai perencanaan perumahan dengan data topografi/kontur kawasan perumahan dan data kepemilikan lahan, adanya alih fungsi pemanfaatan lahan non komersial di dalam kawasan perumahan, rendahnya pelaksanaan pengawasan pengembangan perumahan |
|    |         | 9<br>Adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang mengatur tarif sewa retribusi rusunawa | 9<br>belum adanya DED untuk pembangunan rumah baru sebagai dasar pembangunan untuk pembangunan baru   |
|    |         | 10<br>Adanya aplikasi SIMRUSUN untuk pengelolaan penerimaan sewa retribusi rusunawa   | 10<br>tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana   |
|    |         | 11<br>Pengembangan Aplikasi Master Data Perumahan   | 11<br>Belum ada kesediaan calon penerima untuk menerima bantuan pembangunan akibat dilaksanakan secara  |

| No | Sasaran                         | Faktor Pendorong |  | Faktor Penghambat |  |
|----|---------------------------------|------------------|--|-------------------|--|
|    |                                 |                  |  |                   | swadaya  |
|    |                                 | 12               | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Sektor Perumahan   | 12                |  |
|    |                                 | 13               | Terlaksananya Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan dan Lingkungan   | 13                | Belum terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) di RUSUNAMI   |
|    |                                 | 14               | Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Pengembang Pengembangan Perumahan  | 14                | Kurangnya SDM di UPTD Rusunawa   |
|    |                                 | 15               | Tersusunnya (Review) Siteplan Perumahan PNS Km 7,5 Kel Graha Indah   | 15                | Terdapat kondisi gedung Rusunawa yang tidak layak huni   |
|    |                                 |                  |  | 16                | Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait data perumahan yang berizin  |
|    |                                 |                  |  | 17                | Masih adanya masyarakat yang membeli rumah tidak berizin   |
|    |                                 |                  |  | 18                | Belum adanya data perumahan terintegrasi berbasis sistem informasi yang dapat diakses masyarakat   |
| 2  | Berkurangnya luas kawasan kumuh | 1                | Adanya kerjasama dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam penanganan kawasan kumuh kota                                  | 1                 | tidak adanya intervensi penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha pada tahun 2023  |
|    |                                 | 2                | Kolaborasi dan sinergi antarg perangkat daerah dan instansi terkait (POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Balikpapan) | 2                 | tidak adanya intervensi penanganan kumuh dari Pemerintah Provinsi untuk luasan di atas 10 Ha dan Pemerintah Pusat untuk luasan diatas 15 Ha pada tahun 2023.   |
|    |                                 | 3                | Tersusunnya Penyusunan Kajian Pendataan dan Verifikasi Kumuh pada 11 Kelurahan Kota Balikpapan                                     | 3                 | Pada tahun 2023 terbit Kembali SK kumuh baru seluas 104.69 Ha berdasarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan, bahwa terdapat penetapan jumlah lokasi dan luasan |

| No | Sasaran   | Faktor Pendorong |  | Faktor Penghambat |  |
|----|---|------------------|--|-------------------|--|
|    |   |                  |  |                   | berdasarkan kegiatan RP2KPKPK Tahun 2022.  |
|    |   | 4                | Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota Balikpapan  | 4                 | Masih terdapat kawasan Kumuh dan Potensi munculnya Kawasan kumuh Baru  |
|    |   | 5                | Terlaksananya Penanganan Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai   | 5                 | Masih terdapat Rumah Masyarakat yang Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan   |
|    |   | 6                | Terlaksananya Bantuan Sosial Barang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 100 unit   | 6                 | Belum tersedianya data lengkap rumah tidak layak huni yang terverifikasi dan update periodik secara digital  |
|    |   | 7                | Adanya kerjasama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan / Tenaga Pendamping / Surveyor Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni  | 7                 | Pada tahun 2023 tidak terdapat Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dalam renja dan DPA tahun 2023.  |
|    |   |                  |  | 8                 | Pada tahun 2023 tidak terdapat kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dalam renja dan DPA tahun 2023. |
| 3  | Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai | 1                | Terdapat 6 PSU perumahan yang dilakukan peningkatan/pemeliharaan , yaitu perumahan Kumala Residence 4, Kumala Residence 5, Sepinggan Pratama, Taman Sari Bukit Mutiara, Balikpapan Permai, Balikpapan Baru terhadap 288 jumlah lingkungan perumahan berdasarkan pada Renstra | 1                 | Terdapat Pengembang belum mengajukan permohonan penyerahan PSU   |
|    |   | 2                | adanya Perwali 22/2014 ; Perwali 16/2018   | 2                 | Belum intensifnya pelaksanaan monitoring pemanfaatan PSU   |

| No | Sasaran   | Faktor Pendorong |   | Faktor Penghambat |  |
|----|---|------------------|---|-------------------|--|
|    |   | 3                | Terlaksananya Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan  | 3                 | Tingkat penyerahan PSU rendah  |
|    |   | 4                | Adanya kerjasama dengan para pengembang perumahan, perangkat daerah dan instansi/ lembaga terkait | 4                 | Proses Penyerahan PSU masih njlimet  |
|    |   |                  |   | 5                 | Data kurang update dan informatif  |
|    |   |                  |   | 6.                | Keterbatasan layanan perbaikan lampu PJU dikarenakan belum ada peralatan yang memadai                                  |
|    |   |                  |   | 7.                | Masih terdapat kawasan perumahan yang belum terlayani PSU yang memadai   |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1                | Komitmen pimpinan untuk pencapaian target kinerja   | 1                 | Belum seluruh pegawai memahami dokumen perencanaan perangkat daerah  |
|    |   | 2                | Koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal dan eksternal perangkat daerah terkait         | 2                 | Pengukuran kinerja belum dilaksanakan tepat waktu karena adanya data kinerja yang tidak tersedia secara realtime       |
|    |   |                  |   | 3                 | Analisa dan evaluasi capaian kinerja belum dilakukan secara intensif   |
|    |   |                  |   | 4                 | Adanya perubahan peraturan yang menyebabkan perubahan sasaran, indikator dan target kinerja kinerja program penunjang. |

**b. Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

**c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

SPM yang harus diacu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum. SPM Perumahan

Rakyat yang diampu oleh Disperkim Kota Balikpapan ,sebagaimana dimaksud terdiri dari :

5. Jenis Pelayanan Dasar ,terdiri atas:
  - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
6. Mutu Pelayanan Dasar, terdiri atas :
  - a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana /kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
  - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
  - d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
  - e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
  - f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
7. Penerima Pelayanan terdiri atas:
  - a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
  - b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

d. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*) dan Indikator Kinerja Hasil (IKK *Outcome*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 20 IKK *Output* dan 5 IKK *Outcome*.

Berikut dilampirkan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diampu Disperkim Kota Balikpapan pada Tahun 2023:

**Tabel 2.4**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023**

| No | Indikator   | SPM/<br>stand<br>ar<br>nasio<br>nal | IKK | Target Renstra SKPD |               |               |               |               | Realisasi<br>Capaian | Proyeksi      | Catatan Analisis  |
|----|---|-------------------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|    |   |                                     |     | Tahun<br>2022       | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2023        | Tahun<br>2024 |   |
| 1  | 2   | 3                                   | 4   | 5                   | 6             | 7             | 8             | 9             | 10                   | 11            | 12  |
| 1  | Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni | √                                   |     | 0                   | 18            | 36            | 54            | 72            | 0                    | 8             | Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023, Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan, namun belum terdapat SK Penetapan Bencana. |

| No | Indikator   | SPM/<br>standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD |            |            |            |            | Realisasi Capaian | Proyeksi   | Catatan Analisis   |
|----|---|--------------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|--|
|    |   |                          |     | Tahun 2022          | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023        | Tahun 2024 |  |
| 1  | 2   | 3                        | 4   | 5                   | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                | 11         | 12   |
| 2  | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | √                        |     | N/A                 | N/A        | N/A        | N/A        | N/A        | 0,00%             | 0,00%      | Berdasarkan hasil pendataan SPM tahun 2023 tidak terdapat warga negara yang harus direlokasi akibat program Pemerintah Daerah  |
| 3  | Persentase Permukiman Layak Huni  |                          | √   | 99,05               | 99,32      | 99,55      | 99,78      | 100,00     | 99,11             | 99,55      | Persentase permukiman layak huni sampai dengan akhir tahun 2023 telah mencapai 9,11% dari target kinerja. Disperkim Kota Balikpapan memiliki kewenangan mengurangi kawasan kumuh seluas 5,4 Ha. Luasan tersebut ditangani sebesar 1,41 Ha pada tahun 2022 dan 3,99 di tahun 2023.  |
| 4  | Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni   |                          | √   | 0,00                | 0,01       | 0,02       | 0,03       | 0,04       | 0,00              | 0,02       | Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus difasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan disediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah. |
| 5  | Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU   |                          | √   | 16.75               | 12.18      | 18.18      | 28.26      | 36.42      | 12,18             | 18.18      | Realisasi indikator sasaran ini adalah sebesar 12,18% . Pencapaian ini didukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai  |

| No | Indikator   | SPM/<br>standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD |            |            |            |            | Realisasi Capaian | Proyeksi   | Catatan Analisis  |
|----|---|--------------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|---|
|    |   |                          |     | Tahun 2022          | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023        | Tahun 2024 |   |
| 1  | 2   | 3                        | 4   | 5                   | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                | 11         | 12  |
|    |   |                          |     |                     |            |            |            |            |                   |            | pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU namun belum seluruh PSU diserahkan ke Pemerintah Kota   |
| 6  | Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh                                      |                          | √   | 32,56               | 51,47      | 67,78      | 84,08      | 100,00     | 36,80             | 51,47      | Target Penanganan kumuh ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas 15 Ha, Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha, dan penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha. Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penangan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikpapan Kota. Tahun 2023 terdapat 3,99 Ha penanganan kumuh. |
| 7  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota |                          | √   | 0,00                | 0,01       | 0,01       | 0,02       | 0,03       | 0,00              | 0,01       | .Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak   |

| No | Indikator   | SPM/<br>standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD |            |            |            |            | Realisasi Capaian | Proyeksi   | Catatan Analisis   |
|----|---|--------------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|--|
|    |   |                          |     | Tahun 2022          | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023        | Tahun 2024 |  |
| 1  | 2   | 3                        | 4   | 5                   | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                | 11         | 12   |
|    |   |                          |     |                     |            |            |            |            |                   |            | huni sebanyak 15 rumah, namun tidak terdapat SK penetapan bencana  |
| 8  | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program |                          | √   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | sesuai pendataan SPM Tahun 2023, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi   |
| 9  | persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang di tangani         |                          | √   | 26,11               | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3,99              | 11,08      | Penanganan kawasan kumuh Kota Balikpapan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai  |
| 10 | berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)                            |                          | √   | 0,03                | 0,03       | 0,02       | 0,02       | 0,02       | 0,002             | 0,003      | pada 2023 terverifikasi menjadi sebanyak 517 RTLH. kemudian ditangani sebanyak 66 ditahun 2022 dan 100 unit ditahun 2023 RTLH yang bersumber dari APBD   |
| 11 | jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) |                          | √   | 16.75               | 12.18      | 18.18      | 28.26      | 36.42      | 12,18             | 18.18      | Target penambahan unit rumah yang dilengkapi PSU dan diserahkan adalah sebesar 4,963 unit rumah namun berdasarkan pendataan total unit rumah diperumahan yang dilengkapi PSU adalah 40.755 unit rumah di perumahan di Kota Balikpapan. |
| 12 | Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencananya penanganannya  |                          | √   | 0                   | 18         | 36         | 54         | 72         | 14.074            | 15         | 7.146 unit pada daerah resiko bencana longsor<br>4.898 unit pada daerah resiko rawan abrasi<br>2.030 unit pada daerah resiko kebakaran hutan   |

| No | Indikator   | SPM/<br>stand<br>ar<br>nasio<br>nal | IKK | Target Renstra SKPD |               |               |               |               | Realisasi<br>Capaian | Proyeksi      | Catatan Analisis  |
|----|---|-------------------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|    |   |                                     |     | Tahun<br>2022       | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2023        | Tahun<br>2024 |   |
| 1  | 2   | 3                                   | 4   | 5                   | 6             | 7             | 8             | 9             | 10                   | 11            | 12  |
| 13 | Jumlah rumah yang terkena bencana alam  |                                     | √   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0             | Tahun 2023 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah namun belum terdapat SK Penetapan bencana |
| 14 | Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam                            |                                     | √   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 156                  | 0             | 4 unit rumah korban bencana angin laut<br><br>8 unit rumah korban bencana alam angin puting beliung<br><br>144 unit rumah rusak akibat longsor  |
| 15 | Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi             |                                     | √   | 0,00                | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 8,00          | 0                    | 8             | sesuai pendataan SPM Tahun 2023 Tidak terdapat kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana   |
| 16 | Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi           |                                     | √   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0                    | 10            | sesuai pendataan SPM Tahun 2023 Tidak terdapat kegiatan pembangunan kembali untuk rumah korban bencana  |
| 17 | Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi     |                                     | √   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0             | sesuai pendataan SPM Tahun 2023 Tidak terdapat kegiatan pembangunan baru untuk korban bencana   |
| 18 | Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana |                                     | √   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7                    | 7             | 1. Rusunawa Sepinggian<br><br>2. Rusunawa Perusda<br><br>3. Rusunawa Manggar  |

| No | Indikator  | SPM/<br>stand<br>ar<br>nasio<br>nal | IKK | Target Renstra SKPD |               |               |               |               | Realisasi<br>Capaian | Proyeksi      | Catatan Analisis  |
|----|--|-------------------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|    |  |                                     |     | Tahun<br>2022       | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2023        | Tahun<br>2024 |   |
| 1  | 2  | 3                                   | 4   | 5                   | 6             | 7             | 8             | 9             | 10                   | 11            | 12  |
|    |  |                                     |     |                     |               |               |               |               |                      |               | 4. Rusunawa Siaga<br>5. Rusunawa Sumber<br>6. Rusunawa KM7<br>7. Rusunawa Beriman   |
| 19 | Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi   |                                     | √   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0             | sesuai pendataan SPM Tahun 2023, Tidak terdapat kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota  |
| 20 | Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan  |                                     | √   | 0,00                | 1,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 116,81               | 116,81        | sesuai pendataan SPM Tahun 2023, Lokasi 1 : Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota Lokasi 2 , 3 & 4 : Kel. Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan Lokasi 5 : Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur Lokasi 6 & 7 : Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur Lokasi 8 : Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara |
| 21 | Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM            |                                     | √   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0             | Tidak ada kegiatan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM  |
| 22 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana |                                     | √   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0             | Tidak ada kegiatan fasilitasi ganti hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM  |

| No | Indikator  | SPM/<br>stand<br>ar<br>nasio<br>nal | IKK | Target Renstra SKPD |               |               |               |               | Realisasi<br>Capaian | Proyeksi      | Catatan Analisis  |
|----|--|-------------------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|    |  |                                     |     | Tahun<br>2022       | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2023        | Tahun<br>2024 |   |
| 1  | 2  | 3                                   | 4   | 5                   | 6             | 7             | 8             | 9             | 10                   | 11            | 12  |
|    | pemenuhan SPM  |                                     |     |                     |               |               |               |               |                      |               |   |
| 23 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM                                  |                                     | √   | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | Tidak ada rumah tangga yang menerima layanan subsidi sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM   |
| 24 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM |                                     | √   | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | Tidak terdapat kegiatan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM pada tahun 2023   |
| 25 | Jumlah rumah tangga penerima layanan belum mendapatkan penyediaan rumah pemenuhan SPM layak huni berdasarkan rencana               |                                     | √   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 74                   | 74            | Lokasi 74KK tersebar di 23 Kelurahan dan 6 Kecamatan. Tahun 2023 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan rumah yang terkena bencana alam akan menjadi 59 unit akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah. |
| 26 | Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah   |                                     | √   | 0,00                | 1,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0             | Tidak terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk relokasi pada tahun 2023  |
| 27 | Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha  |                                     | √   | 3,99                | 0,00          |               |               |               | 29,92                | 0             | apaian Pengurangan Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2023 seluas 3,99 Ha. Luas Kumuh di Kota Balikpapan per Tahun 2023 seluas 0 Ha (SK.Walikota Tahun 2020), namun erbit  |

| No | Indikator   | SPM/<br>standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD |            |            |            |            | Realisasi Capaian | Proyeksi   | Catatan Analisis   |
|----|---|--------------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|--|
|    |   |                          |     | Tahun 2022          | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023        | Tahun 2024 |  |
| 1  | 2   | 3                        | 4   | 5                   | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                | 11         | 12   |
|    |   |                          |     |                     |            |            |            |            |                   |            | SK.Walikota Nomor : 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan dengan Luasan Kumuh baru seluas 29,92 dikarenakan pada tahun 2023 terdapat penanganan kawasan kumuh seluas 3.99 Ha maka sisa luasan kawasan kumuh seluas 25.93 Ha  |
| 28 | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH                     |                          | √   | 26                  | 355        | 251        | 499        | 389        | 100               | 250        | Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian. |
| 29 | Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh |                          | √   | 49,91               | 78,90      | 103,90     | 128,90     | 153,30     | 3,99              | 11,08      | Pekerjaan Penanganan Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai berupa Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman, Perbaikan   |

| No | Indikator                                     | SPM/<br>stand ar<br>nasio<br>nal | IKK | Target Renstra SKPD |               |               |               |               | Realisasi<br>Capaian | Proyeksi      | Catatan Analisis   |
|----|---|----------------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--|
|    |   |                                  |     | Tahun<br>2022       | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2023        | Tahun<br>2024 |  |
| 1  | 2   | 3                                | 4   | 5                   | 6             | 7             | 8             | 9             | 10                   | 11            | 12   |
|    |   |                                  |     |                     |               |               |               |               |                      |               | saluran Drainase, dan Jalan Lingkungan.  |
| 30 | Jumlah rumah di kab/kota                      |                                  | √   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 202539               |               | Jumlah rumah formal dan swadaya tahun 2022 dari pendataan RP3KP tahun 2022   |
| 31 | Jumlah unit PK RTLH                           |                                  | √   | 26                  | 355           | 251           | 499           | 389           | 100                  | 250           | 11 Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 :<br>1. kelurahan karang rejo<br>2. kelurahan karang jati<br>3. kelurahan gunung sari ulu<br>4. kelurahan sumber rejo<br>5. kelurahan sungai angka<br>6. kelurahan baru ilir<br>7. kelurahan manggar baru<br>8. kelurahan karang joang<br>9. kelurahan damai<br>10. kelurahan prapatan<br>11. kelurahan klandasan ili |
| 32 | Jumlah rumah tidak layak huni                 |                                  | √   | 556<br>5            | 5210          | 4959          | 4460          | 4071          | 351                  | 258           | Jumlah Data Baseline Rumah Tidak Layak Huni yang akan ditangani di Kota Balikpapan sesuai Target Renstra Disperkim   |
| 33 | Jumlah rumah yang tidak dihuni                |                                  | √   | N/A                 | N/A           | N/A           | N/A           | N/A           | 0                    | 0             | Belum dilakukan pendataan  |
| 34 | Rasio rumah dan KK                            |                                  | √   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 202539:22<br>49748   |               |  |
| 35 | Jumlah rumah pembangunan baru                 |                                  | √   | 131<br>76           | 1817<br>6     | 2317<br>6     | 2817<br>6     | 3317<br>6     | 240                  |               | 109 unit Rumah Swadaya<br><br>131 unit Rumah Formal  |
| 36 | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU       |                                  | √   | 355<br>24           | 3730<br>0     | 3916<br>5     | 4112<br>3     | 4317<br>9     | 4963                 | 2446          | Perumahan yang terfasilitasi PSU dandiserahkan ke Pemerintah Kota  |
| 37 | Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air |                                  | √   | 222<br>45           | 4314<br>5     | 4887<br>3     | 5376<br>0     | 5913<br>6     | 116.014<br>unit      |               | jumlah unit rumah yang terlayani:  |

| No | Indikator   | SPM/              | IKK | Target Renstra SKPD |            |            |            |            | Realisasi  | Proyeksi   | Catatan Analisis  |
|----|---|-------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
|    |   | stand ar nasional |     | Tahun 2022          | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |   |
| 1  | 2   | 3                 | 4   | 5                   | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12  |
|    | minum   |                   |     |                     |            |            |            |            |            |            | s.d akhir tahun 2022 = 115.049 unit<br>tahun 2023 = 965 unit  |
| 38 | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan   |                   | √   | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 202539     |            | Jumlah rumah eksisting Kota Balikpapan tahun 2022   |
| 39 | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)  |                   | √   | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | Kewenangan SPM Akses Sanitasi (On Site/Off Site) Tahun 2023 sudah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |
| 40 | Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH  |                   | √   | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 6          | 6          | Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan   |
| 41 | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU  |                   | √   | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 40755      |            | Jumlah rumah eksisting Kota Balikpapan tahun 2023   |
| 42 | Jumlah pengembang yang tersertifikasi   |                   | √   | 122                 | 122        | 122        | 122        | 122        | 0          | 0          | Tidak ada pengembang yang yang tersertifikasi di tahun 2023   |
| 43 | Jumlah pengembang yang terregistrasi  |                   | √   | 122                 | 122        | 122        | 122        | 122        | 0          | 0          | Tidak ada pengembang yang yang terregistrasi di tahun 20223 karena TIM SRP2 belum terbentuk               |
| 44 | Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan   |                   | √   | 50                  | 50         | 50         | 50         | 50         | 16         | 50         | 13 Perusahaan Pengembang<br>3 Asosiasi Perumahan  |
| 45 | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni   |                   | √   | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | Tidak terdapat update data  |
| 46 | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni |                   | √   | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | sesuai pendataan SPM Tahun 2023, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi                          |

| No | Indikator  | SPM/<br>stand<br>ar<br>nasio<br>nal | IKK | Target Renstra SKPD |               |               |               |               | Realisasi<br>Capaian | Proyeksi      | Catatan Analisis  |
|----|--|-------------------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|    |  |                                     |     | Tahun<br>2022       | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2023        | Tahun<br>2024 |   |
| 1  | 2  | 3                                   | 4   | 5                   | 6             | 7             | 8             | 9             | 10                   | 11            | 12  |
| 47 | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.   |                                     | √   | 2,75                | 2,57          | 2,45          | 2,22          | 2,01          | 16,81                | 0,26          | Tahun 2023 terdapat 3,99 penanganan kumuh, terdapat SK kumuh baru tahun 2023 sebesar 29,92 untuk di bawah 10 Ha |
| 48 | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. |                                     | √   | 97,25               | 97,43         | 97,55         | 97,88         | 97,99         | 99,83                | 99,95         | Terdapat 351 rumah tidak layak huni   |

### 2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Disperkim Kota Balikpapan menghadapi permasalahan dan hambatan.

Adapun identifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan renja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### a. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Renja Tahun 2023

Adapun faktor pendorong untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program-program, dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi renja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang profesional yang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang kerja;
2. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku.
3. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan perencanaan.
4. Koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal dan eksternal dengan instansi terkait serta pihak terkait lainnya.
5. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
6. Adanya data permukiman yang telah update

7. Adanya Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kota Balikpapan
8. Telah disusun dokumen Peraturan Wali Kota Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Balikpapan

**b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Renja Tahun 2023**

Adapun identifikasi faktor penghambat pelaksanaan renja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidakkonsistenan antara jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran antara dokumen Renstra, Renja dan APBD dikarenakan adanya penyesuaian anggaran KUA-PPAS yang lebih rendah dari anggaran program dan kegiatan pada Dokumen Renstra dan Renja Akhir
2. Adanya penyesuaian anggaran sesuai KUA-PPAS maka target kinerja juga menyesuaikan anggaran, apabila anggaran kegiatan lebih sedikit dari usulan renja maka target kinerja pun akan berkurang jika pada kegiatan yang anggaran dan kinerja saling tergantung.
3. Adanya program dan kegiatan terkait perencanaan dan evaluasi pada dokumen Renstra yang tidak dilaksanakan pada APBD karena dianalisis kurang prioritas karena menyesuaikan anggaran KUA-PPAS.
4. Kurangnya komitmen untuk merealisasikan target kinerja dan anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas.
5. Penyusunan draf penyusunan RKA Tahun 2025 sebagai bahan perencanaan yang disusun pada awal tahun 2024 berdasarkan pada standarisasi tahun 2024 sedangkan penyusunan standarisasi tahun 2025 ditetapkan sekitar triwulan IV Tahun 2024 sehingga pada saat penyusunan RKA Tahun 2025 berubah menyesuaikan standar tahun 2025 dan terdapat selisih jumlah.
6. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan satandar pelayanan penanganan Kawasan kumuh.
7. Belum disusunnya peraturan terkait penerapan SPM
8. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman Terintegrasi.
9. Pencegahan dan penanganan permukiman kumuh belum dilakukan secara terpadu.
10. Belum optimalnya kolaborasi antar dinas terkait (Bappedalitbang, Dinas PU, BPBD, DPPR, dan DLH) dalam penanganan kumuh )

11. Terdapat permukiman kumuh di atas 10 Ha-15Ha yang belum diintervensi Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang belum diintervensi Pemerintah Pusat.
12. Adanya perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kota Balikpapan akibat perpindahan Ibu Kota Negara menimbulkan potensi permukiman kumuh baru.
13. Belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni serta rendahnya ketersediaan utilitas permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
14. Masih adanya permukiman illegal.
15. Masih terdapat sarana dan prasarana permukiman yang belum terpenuhi.
16. Proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan rumah tidak layak huni yang memerlukan waktu relatif lama.
17. Masih adanya PSU Perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan
18. Sarana dan prasarana pemeliharaan PSU Perumahan yang belum memadai.
19. Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dan sarana prasarannya
20. Pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum efektif
21. Masih adanya *backlog* kepemilikan rumah;
22. Masih adanya rumah yang berada pada rawan risiko bencana.

#### 2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Disperkim Tahun 2021 -2026, terdapat implikasi terhadap pelayanan Disperkim untuk lima tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang terhadap pelayanan tersebut adalah sebagai berikut ;

##### TANTANGAN :

1. Kebutuhan Perumahan untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN)
2. Meningkatnya kebutuhan terhadap perumahan layak huni sebagai implikasi dari peningkatan laju urbanisasi.
3. Belum adanya regulasi yang mengatur pemberian bantuan PSU di kota Balikpapan.
4. Belum tersedianya basis data bidang perumahan dan permukiman yang akurat dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*Stakeholders*)

PELUANG :

1. Program Nawacita kedua
2. Program Sejuta Rumah
3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Kolaborasi Kewenangan Penanganan Kawasan Kumuh dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kolaborasi Pemberian Bantuan PSU Perumahan dengan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Provinsi Kalimantan Timur.

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi Dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026 dan juga kebutuhan terkait urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka isu strategis yang masih harus ditindaklanjuti dalam Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1 Masih terdapat kawasan kumuh seluas 104.69 Ha di Kota Balikpapan. Pada Tahun 2024 direncanakan kawasan kumuh yang tersisa masih 100.7 Ha dan diupayakan menyelesaikan luasan kumuh sebesar 11.08 Ha pada akhir Tahun 2024 menjadi 89.62 Ha.
- 2 Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan. Seiring dinamisasi pendataan yang dilakukan dan peningkatan kualitas RTLH setiap tahun , maka pada akhir tahun 2022 data RTLH eksisting adalah sebesar 517 unit RTLH. Direncanakan pada tahun 2023 akan berkurang Kembali 100 unit melalui pendanaan APBD, sehingga pada tahun 2024 percepatan pengurangan RTLH akan dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 258 unit. Kondisi akhir yang diinginkan pada Tahun 2024 adalah tersisa RTLH sebanyak 148 unit RTLH.
- 3 Semakin meningkatnya kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau, terlebih sebagai penyangga IKN. Disperkim Kota Balikpapan dalam hal ini akan memfasilitasi kemudahan dalam penyediaan rumah layak huni diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Penyempurnaan tata kelola rencana tapak perumahan dalam rangka memperbaiki dan mempermudah permohonan rekomendasi rencana

- tapak perumahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar pengembang perumahan benar-benar menyediakan rumah beserta PSU sesuai dengan aturan berlaku.
- b. Sosialisasi dan fasilitasi kemudahan memperoleh hunian layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui mekanisme Kredit Kepemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dan penyediaan hunian layak untuk MBR di sembilan (9) lokasi rusunawa Balikpapan yang responsif Gender.
  - c. Penyediaan rumah layak huni melalui rehabilitasi dan pembangunan rumah baru bagi korban bencana dan atau relokasi program pemerintah. Penyediaan rumah layak huni jenis ini merupakan SPM Perumahan Rakyat. Sesuai Rencana aksi SPM Pemerintah Kota Balikpapan, penyediaan ini akan dimulai di Tahun 2023 dan berlanjut di tahun 2024 sampai dengan akhir Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Hal ini merupakan rencana optimalisasi penerapan SPM Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan.
  - d. Kemudahan penyediaan rumah layak huni juga diberikan untuk jenis rumah vertikal dimana, Disperkim Kota Balikpapan memfasilitasi penerbitan rekomendasi Pertelaan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun). Hal ini agar Sarusun Kota Balikpapan yang terbangun telah memenuhi aturan yang berlaku.
- 4 Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan dan permukiman yang akurat. Tahun 2024 akan dibangun Sistem Informasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SIM PKP).
  - 5 Realisasi sasaran meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diwakili oleh Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan belum dicapai 100% pada Tahun 2023. Dari pengawasan dan pengendalian terhadap PSU perumahan maka hal yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti di Tahun 2024 adalah percepatan penyerahan PSU perumahan. Untuk PSU perumahan yang telah diserahkan, isu strategisnya adalah peningkatan dan pemeliharaan PSU, terutama PSU RTH yang berupa taman-taman didalam cakupan klaster perumahan yang PSU nya sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Pada perencanaan Tahun 2024 direncanakan penyediaan/peningkatan/pemeliharaan PSU taman klaster perumahan.

## 2.4 Review tentang Rancangan Akhir RKPD

Review Rancangan Akhir renja Disperkim Kota Balikpapan disusun sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Balikpapan. Beberapa target kinerja dan anggaran sub kegiatan mengalami perubahan. Oleh karena itu terdapat perbedaan numenklatur sub kegiatan bila dibandingkan pada tahap Rancangan Akhir Renja 2024 dengan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024 sebagaimana terlampir pada tabel review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rancangan Akhir Renja Dinas Perumahan dan Permukiman ini belum terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

### BAB. III.

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya. Dalam cakupan Undang – undang tersebut, secara operasional bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tercantum dalam urusan wajib pembangunan nasional.

Selain merujuk pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 juga merujuk pada sasaran strategis ke 3 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tercantum dalam rencana strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 yakni “Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau”

**Tabel 3.1**

#### **Pembagian Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

| No | Sub Urusan   | Daerah Kabupaten/Kota  |
|----|--|--|
| 1  | Perumahan  | a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.  |
|    |  | b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.   |
|    |  | c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).  |
| 2  | Kawasan Permukiman   | a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman   |
|    |  | b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.   |
| 3  | Perumahan dan kawasan permukiman kumuh   | a. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota  |
| 4  | Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)  | a. Penyelenggaraan PSU Perumahan   |
| 5  | Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | a. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. |

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran

#### 3.2.1 Tujuan

Tujuan Disperkim Kota Balikpapan , sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 adalah Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas. Tujuan Disperkim ini merupakan salah satu sasaran Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026.

Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks kepuasan layanan infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Indeks kepuasan layanan infrastruktur didukung oleh indikator yang dihasilkan oleh Disperkim Kota Balikpapan, yaitu indikator tujuan persentase permukiman layak huni. Pada Tahun 2024, indikator tujuan memiliki target ini adalah 99,50 %.

#### 3.2.2 Sasaran

Upaya pencapaian tujuan Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 , didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Jumlah Unit Rumah Layak Huni adalah Jumlah unit rumah yang memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni, dapat mengacu pada data e-RTLH. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni. Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah 99.95%.
2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah 18,18 %.
3. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh. Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah 67,78 %.
4. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran ini diukur dengan melaksanakan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Sasaran ini memiliki indikator Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah nilai 76.

**Tabel 3.2**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| NO | TUJUAN/<br>SASARAN                                      | INDIKATOR<br>TUJUAN /SASARAN     | DATA<br>CAPAIAN<br>PADA<br>TAHUN<br>AWAL<br>PERENCAN<br>AAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |        |        |        |      |
|----|---|----------------------------------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|------|
|    |   |                                  |   | 2022                          | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 |
| 1  | Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas | Persentase Permukiman Layak Huni | 98,59%  | 99,05%                        | 99,32% | 99,50% | 99,78% | 100% |

| NO  | TUJUAN/<br>SASARAN  | INDIKATOR<br>TUJUAN /SASARAN  | DATA<br>CAPAIAN<br>PADA<br>TAHUN<br>AWAL<br>PERENCAN<br>AAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |        |        |        |  |
|-----|---|---|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--|
|     |   |   |   | 2022                          | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| 1.1 | Meningkatnya cakupan rumah layak huni                           | Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni   | 0,00%   | 0,00%                         | 99.83% | 99.95% | 100%   | akan menggunakan Baseline baru di pendataan tahun 2024 karena rencana sudah tercapai di tahun 2025 |
| 1.2 | Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.  | Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU                           | 16,70%  | 16,75%                        | 12.18% | 18.18% | 28.26% | 36.42%   |
| 1.3 | Mengurangi luas kawasan kumuh                                   | Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh  | 0,00%   | 32,56%                        | 51.47% | 67.78% | 84.00% | 100.00%  |
| 1.4 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan | NA  | 27                            | 75     | 76     | 78     | 80   |

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menyusun program dan kegiatan di tahun 2024 , Dinas Perumahan dan Permukiman mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Memperhatikan rancangan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 , Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 merujuk pada tema pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024 yaitu Mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif. Program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan masuk ke misi ke tiga (3) RPJMD Tahun 2021 - 2026 yaitu “Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai”

b. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). Target TPB yang diampu dan menjadi salah satu indikator program pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Target 11.1 yaitu Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Target 11.1 TPB memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

c. Pengentasan Kemiskinan.

Salah satu tujuan program dan kegiatan Disperkim Kota Balikpapan pada tahun 2024 adalah pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung tujuan pengentasan kemiskinan ini terdapat perbaikan rumah tidak layak huni dan juga pemberian kemudahan akses perumahan bagi MBR.

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rankhir Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 terintegrasi dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

e. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rankhir Perubahan Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 terdiri atas 5 Program, 17 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan. Berikut disajikan rencana program dan kegiatan Rankhir Perubahan Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana terlampir

## **BAB. IV.**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Rankhir Perubahan Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Kerja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Kota Balikpapan.

Adapun perubahan rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir dengan Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah menyusun rancangan akhir perubahan rencana kerja tahun 2024 dengan total anggaran sebesar **Rp.38,057,582,450,00** yang berasal dari APBD-P Kota Balikpapan, yang terdiri dari 5 program, 17 kegiatan dan 47 Sub kegiatan. Terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yaitu

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

#### **1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**

1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

Adapun keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

Merupakan Prioritas Program yang menjadi Urusan Wajib pada Belanja Langsung, dengan usulan program dan pagu anggaran sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Usulan Progam Prioritas**

| No | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN      | SEBELUM PERUBAHAN        | SETELAH PERUBAHAN        | SELISIH PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                | 11,385,000,000.00        | 11,331,020,000.00        | (53,980,000.00)                   |
| 2  | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    | 10,400,000,000.00        | 3,547,183,700.00         | (6,852,816,300.00)                |
| 3  | 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                | 0.00                     | 6,818,600,000.00         | 6,818,600,000.00                  |
| 4  | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 4,550,000,000.00         | 4,448,805,600.00         | (101,194,400.00)                  |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>26,335,000,000.00</b> | <b>26,145,609,300.00</b> | <b>(189,390,700.00)</b>           |

Adapun kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
Adapun kegiatan dan sub kegiatan TA 2024

| 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  | SEBELUM PERUBAHAN        | SETELAH PERUBAHAN        | SELISIH PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) | KETERANGAN |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>   | <b>11,385,000,000.00</b> | <b>11,331,020,000.00</b> | <b>(53,980,000.00)</b>            |            |
| <b>1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                 | <b>225,000,000.00</b>    | <b>225,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>                       |            |
| 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana  | 75,000,000.00            | 75,000,000.00            | 0.00                              |            |
| 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   | 100,000,000.00           | 100,000,000.00           | 0.00                              |            |
| 1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  | 50,000,000.00            | 50,000,000.00            | 0.00                              |            |
| <b>1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | <b>335,000,000.00</b>    | <b>335,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>                       |            |
| 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana        | 100,000,000.00           | 100,000,000.00           | 0.00                              |            |

|  |                         |                         |                 |   |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 1.04.02.2.02.0004<br>Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator  | 75,000,000.00           | 75,000,000.00           | 0.00            |   |
| 1.04.02.2.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                              | 60,000,000.00           | 60,000,000.00           | 0.00            |   |
| 1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                   | 100,000,000.00          | 100,000,000.00          | 0.00            |   |
| <b>1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                           | <b>1,575,000,000.00</b> | <b>1,575,000,000.00</b> | 0.00            |   |
| 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana   | 1,000,000,000.00        | 1,000,000,000.00        | 0.00            |   |
| 1.04.02.2.03.0007 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota  | 100,000,000.00          | 100,000,000.00          | 0.00            |   |
| 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota                                   | 475,000,000.00          | 475,000,000.00          | 0.00            |   |
| <b>1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>   | <b>6,500,000,000.00</b> | <b>6,486,510,000.00</b> | (13,490,000.00) |   |
| 1.04.02.2.05.0001 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun   | 4,500,000,000.00        | 4,500,000,000.00        | 0.00            |   |
| 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus   | 2,000,000,000.00        | 1,986,510,000.00        | (13,490,000.00) | Pengurangan=Belanja Laptop Administrasi dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya) |
| <b>1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>   | <b>2,650,000,000.00</b> | <b>2,609,510,000.00</b> | (40,490,000.00) |   |
| 1.04.02.2.06.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 50,000,000.00           | 50,000,000.00           | 0.00            |   |
| 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                    | 2,500,000,000.00        | 2,459,510,000.00        | (40,490,000.00) | Pengurangan = belanja Laptop (2 unit) dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)   |

|   |                   |                  |                    |   |
|---|-------------------|------------------|--------------------|---|
| 1.04.02.2.06.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | 100,000,000.00    | 100,000,000.00   | 0.00               |   |
| <b>1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>  | 100,000,000.00    | 100,000,000.00   | 0.00               |   |
| 1.04.02.2.07.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)                                | 100,000,000.00    | 100,000,000.00   | 0.00               |   |
| <b>1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>   | 10,400,000,000.00 | 3,547,183,700.00 | (6,852,816,300.00) |   |
| <b>1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>   | 45,000,000.00     | 45,000,000.00    | 0.00               |   |
| 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman  | 45,000,000.00     | 45,000,000.00    | 0.00               |   |
| <b>1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>                   | 1,375,000,000.00  | 921,400,000.00   | (453,600,000.00)   |   |
| 1.04.03.2.02.0004 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh  | 1,100,000,000.00  | 646,400,000.00   | (453,600,000.00)   | Pengurangan=Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan / Tenaga Pendamping Kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kota Balikpapan sebanyak 6 orang |
| 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh   | 85,000,000.00     | 85,000,000.00    | 0.00               |   |
| 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh  | 190,000,000.00    | 190,000,000.00   | 0.00               |   |
| <b>1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>                                | 8,980,000,000.00  | 2,580,783,700.00 | (6,399,216,300.00) |   |

|  |                  |                  |                    |   |
|--|------------------|------------------|--------------------|---|
| 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   | 7,240,000,000.00 | 867,357,100.00   | (6,372,642,900.00) | Pengurangan=Bantuan Sosial Berupa Bahan Bangunan untuk Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Balikpapan semula 258 unit menjadi 15 unit dialihkan ke sub kegiatan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha |
| 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                     | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    | 0.00               |   |
| 1.04.03.2.03.0011 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh   | 335,000,000.00   | 308,426,600.00   | (26,573,400.00)    | Pengurangan=belanja Printer Inkjet dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)  |
| 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   | 0.00               |   |
| 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh   | 1,155,000,000.00 | 1,155,000,000.00 | 0.00               |   |
| <b>1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>   | 4,550,000,000.00 | 4,448,805,600.00 | (101,194,400.00)   |   |
| <b>1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>   | 4,550,000,000.00 | 4,448,805,600.00 | (101,194,400.00)   |   |

|  |                  |                         |                         |  |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1.04.05.2.01.0001<br>Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan  | 200,000,000.00   | 110,083,600.00          | (89,916,400.00)         | Pengurangan=belanja modal laptop, PC Desktop,Hardisk Eksternal,Printer Inkjet dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)  |
| 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian         | 4,200,000,000.00 | 4,197,226,000.00        | (2,774,000.00)          | Pengurangan=belanja modal hardisk eksternal dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)  |
| 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 150,000,000.00   | 141,496,000.00          | (8,504,000.00)          | Pengurangan=belanja modal Kamera DSLR dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)  |
| <b>1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>  | <b>0.00</b>      | <b>6,818,600,000.00</b> | <b>6,818,600,000.00</b> | <b>Penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan baru berdasarkan Telaahan Staf Kepala Disperkim Kota Balikpapan kepada Walikota Balikpapan nomor 891.1/0030/E/Di sperkim tanggal 22 Januari 2024 Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun 2024.</b> |
| <b>1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | <b>0.00</b>      | <b>6,818,600,000.00</b> | <b>6,818,600,000.00</b> |  |

|  |  |                  |                  |   |
|--|--|------------------|------------------|---|
| 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |  | 6,365,000,000.00 | 6,365,000,000.00 | Penambahan=dari sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk 242 Unit Bantuan untuk RTLH di Luar Kumuh ke Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Baru di luar Kawasan Kumuh, serta Tambahan Makan Minum Sosialisasi, dan Pendataan dan verifikasi RTLH se Kota Balikpapan (untuk CPB tahun 2025), |
| 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh   |  | 453,600,000.00   | 453,600,000.00   | Penambahan=untuk Honor TFL Pendamping LKM (Kota Kita) diluar Kawasan Kumuh sebanyak 6 Orang   |

**b. Program Pendukung Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

Merupakan program untuk mendukung pelaksanaan program utama ( Urusan Wajib / Belanja Langsung ), dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

| No | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN    | SEBELUM PERUBAHAN        | SETELAH PERUBAHAN        | SELISIH PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12,400,932,000.00        | 11,911,973,150.00        | (488,958,850.00)                  |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>12,400,932,000.00</b> | <b>11,911,973,150.00</b> | <b>(488,958,850.00)</b>           |

Adapun perubahan kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sebagai berikut:

| <b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>               | <b>SEBELUM PERUBAHAN</b> | <b>SETELAH PERUBAHAN</b> | <b>SELISIH PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN)</b> | <b>Keterangan</b>  |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>            | 12,400,932,000.00        | 11,911,973,150.00        | (488,958,850.00)                         |  |
| <b>1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                            | 7,303,263,550.00         | 6,624,914,000.00         | (678,349,550.00)                         |  |
| 1.04.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 7,303,263,550.00         | 6,624,914,000.00         | (678,349,550.00)                         | Pengurangan=belanja gaji dan tunjangan (sisa lebih analisa ketercukupan gaji dan tunjangan s.d Desember) |
| <b>1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                         | 480,892,500.00           | 480,892,500.00           | 0.00                                     |  |
| 1.04.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | 30,892,500.00            | 30,892,500.00            | 0.00                                     |  |
| 1.04.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | 450,000,000.00           | 450,000,000.00           | 0.00                                     |  |
| <b>1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                | 851,560,050.00           | 1,008,128,050.00         | 156,568,000.00                           |  |
| 1.04.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 16,980,000.00            | 16,980,000.00            | 0.00                                     |  |
| 1.04.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 418,864,100.00           | 418,864,100.00           | 0.00                                     |  |
| 1.04.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 112,283,950.00           | 112,283,950.00           | 0.00                                     |  |
| 1.04.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 3,432,000.00             | 0                        | (3,432,000.00)                           | Pengurangan dialihkan ke belanja sppd sub kegiatan Penyelenggaraan                                       |

|  |                       |                       |                        |  |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
|  |                       |                       |                        | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |
| 1.04.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | 250,000,000.00        | 410,000,000.00        | 160,000,000.00         | Penambahan:<br>pergeseran penambahan dari belanja honorarium dan BPJS tenaga non PNS dan belanja koran dan beanja modal peralatan kantor (2 orang) |
| 1.04.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                           | 50,000,000.00         | 50,000,000.00         | 0.00                   |  |
| <b>1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>267,476,000.00</b> | <b>351,812,000.00</b> | <b>84,336,000.00</b>   |  |
| 1.04.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel   | 43,603,000.00         | 43,603,000.00         | 0.00                   |  |
| 1.04.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                           | 223,873,000.00        | 308,209,000.00        | 84,336,000.00          | Penambahan= belanja modal peralatan kantor dari sub kegiatan di bidang-bidang  |
| <b>1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>936,375,600.00</b> | <b>880,365,600.00</b> | <b>(56,010,000.00)</b> |  |
| 1.04.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik         | 170,000,000.00        | 170,000,000.00        | 0.00                   |  |
| 1.04.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                           | 766,375,600.00        | 710,365,600.00        | (56,010,000.00)        | Pengurangan= belanja honorarium tenaga non PNS dan BPJS (2 orang) dialihkan ke belanja SPPD  |

|   |                  |                  |              |   |
|---|------------------|------------------|--------------|---|
| <b>1.04.01.2.09<br/>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>   | 2,561,364,300.00 | 2,565,861,000.00 | 4,496,700.00 |   |
| 1.04.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | 349,931,600.00   | 349,931,600.00   | 0.00         | Pergeseran<br>=<br>penambah<br>an<br>Pemelihara<br>an<br>Kendaraan<br>Dinas Tipe<br>4 dan<br>Pergantian<br>Suku<br>Cadang<br>Roda 4<br>(esselon II)<br>dari<br>pengurang<br>an belanja<br>Pergantian<br>Suku<br>Cadang<br>Roda 4 dan<br>Bahan<br>Bakar Non<br>Subsidi<br>Pemelihara<br>an<br>Kendaraan<br>Dinas roda<br>2 |
| 1.04.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan     | 119,719,300.00   | 124,216,000.00   | 4,496,700.00 | Penambah<br>an=Belanja<br>Pembayara<br>n Pajak<br>kendaraan<br>operasional<br>roda 4  |
| 1.04.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya  | 95,425,800.00    | 95,425,800.00    | 0.00         |   |
| 1.04.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya   | 1,996,287,600.00 | 1,996,287,600.00 | 0.00         |   |

#### **4.2 RENCANA ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2024**

Adapun rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2024 hasil input melalui <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> sebagaimana terlampir.

## **BAB V PENUTUP**

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam bidang urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, untuk meningkatkan capaian kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, maka pada tahun anggaran 2024, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan melakukan evaluasi kembali terhadap perencanaan dan penganggaran sehingga dilakukan perubahan target dan inikator beserta pendanaan program kerja, yang terdiri dari 5 program, 17 kegiatan dan 47 Sub kegiatan. Program kerja tersebut akan menjadi acuan bagi setiap bidang-bidang dalam menjalankan rencana aksi pelaksanaan kegiatan di mekanisme perubahan, dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien dalam merealisasikan target dan inikator beserta pendanaan program kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024. Program kerja tersebut akan menjadi acuan bagi setiap bidang-bidang dalam menjalankan rencana aksi pelaksanaan kegiatan dengan harapan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien guna mendukung tujuan dan sasran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024, semoga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2024 sesuai perencanaan program kerja dan menghasilkan outcome yang berkualitas.

Balikpapan, 05 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KOTA BALIKPAPAN**





| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |  |                              |           |  | KELompok Sasaran | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023 |                                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-13) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)            |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   | SEBELUM                                | SEUDAH     | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                                |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14   | 15                           | 16        | 17   | 18               | 19                                | 20                             | 21                                |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                                  |  |   | 50 Dokumen                             | 50 Dokumen | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 50.000.000,00       | 0,00                        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 0,00                           | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | IKM Layanan Pengadaan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                                  |  |   | 80 Nilai                               | 80 Nilai   | 267.681.000,00      | 267.476.000,00    | 351.612.000,00      | 84.131.000,00               |  |                              |           | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 250.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
|    | 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |                                  |  |   |  |            |                     |                   |                     |                             |  |                              |           |  |                  |                                   |                                |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 43.698.800,00       | 43.603.000,00     | 43.603.000,00       | -95.800,00                  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 50.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
|    | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |                                  |  |   |  |            |                     |                   |                     |                             |  |                              |           |  |                  |                                   |                                |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                                  |  |   | 5 Unit                                 | 24 Unit    | 223.982.400,00      | 223.873.000,00    | 308.208.000,00      | 84.226.800,00               | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 200.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
|    | 1.04.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                                  |  |   | 80 Nilai                               | 80 Nilai   | 936.378.400,00      | 936.375.600,00    | 880.365.600,00      | -56.012.800,00              |  |                              |           | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 1.000.000.000,00                  | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
|    | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |                                  |  |   |  |            |                     |                   |                     |                             |  |                              |           |  |                  |                                   |                                |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                       |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 170.000.000,00      | 170.000.000,00    | 170.000.000,00      | 0,00                        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 200.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
|    | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |                                  |  |   |  |            |                     |                   |                     |                             |  |                              |           |  |                  |                                   |                                |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan  | 788.378.400,00      | 786.375.600,00    | 710.385.600,00      | -56.012.800,00              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 800.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
|    | 1.04.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                                  |  |   | 80 Nilai                               | 80 Nilai   | 2.563.012.400,00    | 2.561.364.300,00  | 2.585.861.000,00    | 2.848.800,00                |  |                              |           | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 610.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
|    | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |                                  |  |   |  |            |                     |                   |                     |                             |  |                              |           |  |                  |                                   |                                |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                       |                                  |  |   | 33 Unit                                | 33 Unit    | 349.989.800,00      | 349.931.600,00    | 349.931.600,00      | -58.300,00                  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 360.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
|    | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |                                  |  |   |  |            |                     |                   |                     |                             |  |                              |           |  |                  |                                   |                                |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       |                                  |  |   | 2 Unit                                 | 2 Unit     | 119.982.500,00      | 119.719.300,00    | 124.216.000,00      | 4.233.500,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 130.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
|    | 1.04.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |                                  |  |   |  |            |                     |                   |                     |                             |  |                              |           |  |                  |                                   |                                |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |  |   | 111 Unit                               | 111 Unit   | 95.435.000,00       | 95.425.800,00     | 95.425.800,00       | -9.200,00                   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 100.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
|    | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |                                  |  |   |  |            |                     |                   |                     |                             |  |                              |           |  |                  |                                   |                                |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 1.997.605.000,00    | 1.996.287.600,00  | 1.996.287.600,00    | -1.317.400,00               | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 220.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 2  | 1.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | Persentase Penyediaan Rumah Layak Hati bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Rakasa Program Pemerintah Kabupaten/Kota |                                  |  |   | 28,00 %                                | 28,00 %    | 11.385.000.000,00   | 11.385.000.000,00 | 11.331.620.000,00   | -293.000.000,00             |  |                              |           | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                  | 11.092.000.000,00                 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022 | PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                     |                  |                             |        |             |  |                              |  | KELOMPOK SASARAN                                   | PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                | PERANGKAT DASAR PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|--------|-------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2024                            |                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS  |                              | TARGET   |  | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                |                                  |                                |
|    |                   |   |   |                                  |  |   | SEBELUM                                | SESUDAH        | RKPD 2024           | APBD 2024        |                             |        |             | RKPD PERUBAHAN 2024  | NASIONAL                     |  |  |                                   | DAERAH         |                                  |                                |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6  | 7   | 8                                      | 9              | 10                  | 11               | 12                          | 13     | 14          | 15   | 16                           | 17   | 18   | 19                                | 20             | 21                               |                                |
|    | 1.04.02.2.01      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                 | persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |                                  |  |   | 32,89 %                                | 32,89 %        | 225.000.000,00      | 225.000.000,00   | 225.000.000,00              |        | 0,00        |  | -                            | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |  |                                   | 307.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   |                                |
|    | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana  | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah                                     |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 75.000.000,00       | 75.000.000,00    | 75.000.000,00               |        | 0,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 100.000.000,00                   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.01.0000 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00              |        | 0,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 132.000.000,00                   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi                                  |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen      | 50.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00               |        | 0,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 75.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.02      | Sosialisasi dan Pemisahan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah                                 |                                  |  |   | 32,89 %                                | 32,89 %        | 335.000.000,00      | 335.000.000,00   | 335.000.000,00              |        | 0,00        |  |                              | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 410.000.000,00                   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggapi Bencana     | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota    |                                  |  |   | 200 Orang                              | 200 Orang      | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00              |        | 0,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 50.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.02.0004 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator  | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih  |                                  |  |   | 100 Orang                              | 100 Orang      | 75.000.000,00       | 75.000.000,00    | 75.000.000,00               |        | 0,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 200.000.000,00                   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.02.0006 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                           | Jumlah orang yang berkeaktifan dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota            |                                  |  |   | 1 Orang                                | 36 Orang       | 60.000.000,00       | 60.000.000,00    | 60.000.000,00               |        | 0,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 60.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.02.0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembayaran Perumahan                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembayaran Perumahan                          |                                  |  |   | 90 Orang                               | 100 Orang      | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00              |        | 0,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 100.000.000,00                   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.03      | Pertambangan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                         | Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                      |                                  |  |   | 78,85 %                                | 78,85 %        | 1.575.000.000,00    | 1.575.000.000,00 | 1.575.000.000,00            |        | 0,00        |  |                              | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 1.200.000.000,00                 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana  | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Tersejahter   |                                  |  |   | 35 Unit Rumah                          | 35 Unit Rumah  | 1.000.000.000,00    | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00            |        | 0,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 800.000.000,00                   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.03.0007 | Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota   | Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah                                    |                                  |  |   | 1 Rumah Tangga                         | 1 Rumah Tangga | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00              |        | 0,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 400.000.000,00                   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.03.0009 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota                                | Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota   |                                  |  |   | 1 Unit Rumah                           | 1 Unit Rumah   | 475.000.000,00      | 475.000.000,00   | 475.000.000,00              |        | 0,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Pemertan infrastruktur yang berkualitas |                                   |                | 0,00                             | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                   |                             |                   |  |                              |          |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023 |                  | PENGINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|------------------------------|----------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2024                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI            | SUMBER DANA                                      | PRIORITAS                    |          | TARGET   |                  | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                  |                                    |
|    |                   |   |  |                                  |  |   | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2024           | APBD 2024         |                             |                   |  | RKPD PERUBAHAN 2024          | NASIONAL |  |                  |                                   | DAERAH           |                                    |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9             | 10                  | 11                | 12                          | 13                | 14   | 15                           | 16       | 17   | 18               | 19                                | 20               | 21                                 |
|    | 1.04.02.2.05      | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  | persentase hunian Rumah milik pemerintah Kota yang terjangkau  |                                  |  |   | 78,85 %                                | 78,85 %       | 6.500.000.000,00    | 6.500.000.000,00  | 6.488.510.000,00            | -13.480.000,00    |  |                              |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 7.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.02.2.05.0001 | fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun  |  |                                  |  |   |  |               |                     |                   |                             |                   |  |                              |          |  |                  |                                   |                  |                                    |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun   |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 4.500.000.000,00    | 4.500.000.000,00  | 4.500.000.000,00            | 0,00              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 100.000.000,00   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  |  |                                  |  |   |  |               |                     |                   |                             |                   |  |                              |          |  |                  |                                   |                  |                                    |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 2.000.000.000,00    | 2.000.000.000,00  | 1.888.510.000,00            | -13.480.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 6.900.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.02.2.06      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  | Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi/ rencana tepat  |                                  |  |   | 13,16 %                                | 13,16 %       | 2.650.000.000,00    | 2.650.000.000,00  | 2.609.510.000,00            | -40.480.000,00    |  |                              |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 2.125.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.02.2.06.0001 | fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik |  |                                  |  |   |  |               |                     |                   |                             |                   |  |                              |          |  |                  |                                   |                  |                                    |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Realisasi dengan Pengembangan/Peleluasaan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik      |                                  |  |   | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen     | 50.000.000,00       | 50.000.000,00     | 50.000.000,00               | 0,00              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 50.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                     |  |                                  |  |   |  |               |                     |                   |                             |                   |  |                              |          |  |                  |                                   |                  |                                    |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                     |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 2.500.000.000,00    | 2.500.000.000,00  | 2.459.510.000,00            | -40.480.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 2.025.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.02.2.06.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum |  |                                  |  |   |  |               |                     |                   |                             |                   |  |                              |          |  |                  |                                   |                  |                                    |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00              | 0,00              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 80.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.02.2.07      | Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)  | Jumlah Rekomendasi/ Teknis SKBG yang diterbitkan   |                                  |  |   | 3 rekomendasi                          | 3 rekomendasi | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00              | 0,00              |  |                              |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 50.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.02.2.07.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)                                |  |                                  |  |   |  |               |                     |                   |                             |                   |  |                              |          |  |                  |                                   |                  |                                    |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)                                |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 100.000.000,00      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00              | 0,00              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 50.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
| 3  | 1.04.03           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  | Luasan Kawasan Kumuh (Ha)  |                                  |  |   | 25,42 Ha                               | 25,42 Ha      | 9.290.000.000,00    | 10.490.000.000,00 | 3.647.183.709,00            | -3.839.000.000,00 |  |                              |          |  |                  |                                   | 5.378.000.000,00 |                                    |
|    | 1.04.03.2.01      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman   | Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman  |                                  |  |   | 50,00 %                                | 50,00 %       | 45.000.000,00       | 45.000.000,00     | 45.000.000,00               | 0,00              |  |                              |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 100.000.000,00   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman  |  |                                  |  |   |  |               |                     |                   |                             |                   |  |                              |          |  |                  |                                   |                  |                                    |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman  |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 45.000.000,00       | 45.000.000,00     | 45.000.000,00               | 0,00              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 100.000.000,00   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.03.2.02      | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                     | Jumlah Luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh  |                                  |  |   | 127,88 Hektar                          | 127,88 Hektar | 375.000.000,00      | 1.375.000.000,00  | 921.400.000,00              | 546.400.000,00    |  |                              |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 420.000.000,00   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.03.2.02.0004 | Penyadaran Publik Pencogahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh  |  |                                  |  |   |  |               |                     |                   |                             |                   |  |                              |          |  |                  |                                   |                  |                                    |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Publik Pencogahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                      |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 100.000.000,00      | 1.100.000.000,00  | 646.400.000,00              | 546.400.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |          | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas<br>Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                   | 120.000.000,00   | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     |
|    | 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembiayaan Kelompok Bawidaya Masyarakat di Permukiman Kumuh   |  |                                  |  |   |  |               |                     |                   |                             |                   |  |                              |          |  |                  |                                   |                  |                                    |

| NO                | KODE    | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANOKA PENDANAAN |                       |                     |                         |                             |                         | BERBAGI/BERKURANG (10-12)                        | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023 |                                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|---------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------|--|--------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                   |         |  |  |                                  |                                      |   | TARGET 2024                            |                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                         | Bertambah/Berkurang (10-12) | NABIONAL                |  |  |                              | DAERAH   | TARGET |                  | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                |                                   |
|                   |         |  |  |                                  |                                      |   | SEBELUM                                | SESUDAH               | RKPD 2024           | APBD 2024               |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   | RKPD PERUBAHAN 2024            |                                   |
| 1                 | 2       | 3  | 4  | 5                                | 6                                    | 7   | 8                                      | 9                     | 10                  | 11                      | 12                          | 13                      | 14   | 15   | 16                           | 17   | 18     | 19               | 20                                | 21                             |                                   |
|                   |         |  | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/aktif   |                                  |                                      |   | 1 Kelompok Masyarakat                  | 6 Kelompok Masyarakat | 85.000.000,00       | 85.000.000,00           | 85.000.000,00               |                         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | -                            | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |        |                  | 100.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 1.04.03.2.02.0014 |         |  | Survei dan Penetapan Lokasi Pemukiman Kumuh  |                                  |                                      |   |  |                       |                     |                         |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   |                                |                                   |
|                   |         |  | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Pemukiman dan Permukiman Kumuh  |                                  |                                      |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 190.000.000,00      | 190.000.000,00          | 190.000.000,00              |                         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | -                            | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |        |                  | 300.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 1.04.03.2.03      |         |  | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha   |                                  |                                      |   | 42,44 %                                | 42,44 %               | 8.780.000.000,00    | 8.880.000.000,00        | 2.560.763.700,00            | -6.199.216.300,00       |  |  |                              |  |        |                  | 4.850.000.000,00                  | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 1.04.03.2.03.0002 |         |  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   |                                  |                                      |   |  |                       |                     |                         |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   |                                |                                   |
|                   |         |  | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki  |                                  |                                      |   | 250 Unit Rumah                         | 15 Unit Rumah         | 7.040.000.000,00    | 7.240.000.000,00        | 867.357.100,00              | -6.172.642.900,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | -                            | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |        |                  | 3.850.000.000,00                  | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 1.04.03.2.03.0004 |         |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan/Permukiman Kumuh  |                                  |                                      |   | 1 Laporan                              | 1 Laporan             | 50.000.000,00       | 50.000.000,00           | 50.000.000,00               |                         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | -                            | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |        |                  | 100.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 1.04.03.2.03.0011 |         |  | Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh   |                                  |                                      |   |  |                       |                     |                         |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   |                                |                                   |
|                   |         |  | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali  |                                  |                                      |   | 1 Ha                                   | 1 Ha                  | 335.000.000,00      | 335.000.000,00          | 308.426.600,00              | -26.573.400,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | -                            | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |        |                  | 500.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 1.04.03.2.03.0012 |         |  | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha   |                                  |                                      |   |  |                       |                     |                         |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   |                                |                                   |
|                   |         |  | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha  |                                  |                                      |   | 3 Unit                                 | 3 Unit                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00          | 200.000.000,00              |                         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | -                            | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |        |                  | 400.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 1.04.03.2.03.0013 |         |  | Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh   |                                  |                                      |   |  |                       |                     |                         |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   |                                |                                   |
|                   |         |  | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar   |                                  |                                      |   | 11,08 Ha                               | 11,08 Ha              | 1.155.000.000,00    | 1.155.000.000,00        | 1.155.000.000,00            |                         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | -                            | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |        |                  | 0,00                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 4                 | 1.04.04 |  | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>  |                                  |                                      |   |  |                       |                     |                         |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   |                                |                                   |
|                   |         |  | <b>Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Halaman yang Layak</b>  |                                  |                                      |   |  | <b>0,68 %</b>         | <b>0,69</b>         | <b>0,69</b>             | <b>6.818.800.000,00</b>     | <b>4.295.548.000,00</b> |  |  |                              |  |        |                  | <b>4.295.548.000,00</b>           |                                |                                   |
| 1.04.04.2.01      |         |  | Pencogahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Berkebangnya Permukiman Kumuh  |                                  |                                      |   |  |                       |                     |                         |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   |                                |                                   |
|                   |         |  | Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencogahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh  |                                  |                                      |   | 1 kawasan                              |                       | 0,00                | 0,00                    | 6.818.800.000,00            | 6.818.800.000,00        |  |  |                              |  |        |                  | 4.295.548.000,00                  | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 1.04.04.2.01.0001 |         |  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencogahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki |                                  |                                      |   |  |                       |                     |                         |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   |                                |                                   |
|                   |         |  | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencogahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki    |                                  |                                      |   | 242 Unit Rumah                         |                       | 0,00                | 0,00                    | 6.365.000.000,00            | 6.365.000.000,00        |  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |        |                  | 3.866.693.500,00                  | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 1.04.04.2.01.0008 |         |  | Penyediaan Publik Pencogahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh   |                                  |                                      |   |  |                       |                     |                         |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   |                                |                                   |
| 5                 | 1.04.05 |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>   |                                  |                                      |   |  |                       |                     |                         |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   |                                |                                   |
|                   |         |  | <b>Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan</b>  |                                  |                                      |   |  | <b>5,21 %</b>         | <b>6,21 %</b>       | <b>2.750.600.000,00</b> | <b>4.566.000.000,00</b>     | <b>4.448.805.600,00</b> | <b>-935.000.000,00</b>                           |  |                              |  |        |                  |                                   | <b>1.815.000.000,00</b>        |                                   |
| 1.04.05.2.01      |         |  | Usulan Penyelenggaraan PSU Perumahan   |                                  |                                      |   | 1 Hektar                               | 1 Hektar              | 2.750.000.000,00    | 4.560.000.000,00        | 4.448.805.600,00            | -1.698.805.600,00       |  |  |                              |  |        |                  | 1.815.000.000,00                  | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 1.04.05.2.01.0001 |         |  | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan   |                                  |                                      |   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen             | 200.000.000,00      | 200.000.000,00          | 110.083.600,00              | -89.916.400,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | -                            | Mewujudkan Pemertan Infrastruktur yang berkualitas |        |                  | 100.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |                                   |
| 1.04.05.2.01.0002 |         |  | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian   |                                  |                                      |   |  |                       |                     |                         |                             |                         |  |  |                              |  |        |                  |                                   |                                |                                   |

| NO                 | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN HASIL OPD TAHUN 2022 | PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                          |                          |                          |                             |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023 |                     | PESANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |      |
|--------------------|------|--|---|----------------------------------|--|--|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|
|                    |      |  |   |                                  |  |  | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                          |                          | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |      |
|                    |      |  |   |                                  |  |  | SEBELUM                                | BESUDAH   | RKPD 2024                | APBD 2024                | RKPD PERUBAHAN 2024      |                             |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                  |                     |                                   | PAGU |
|                    |      |  |   |                                  |  |  | 8                                      | 9         | 10                       | 11                       | 12                       | 13                          | 14   | 15                           | 16        | 17   |                  | 18                               | 19                  |                                   | 20   |
|                    |      |  | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Pungsi Hukit                |                                  |  |  | 3 Lokasi                               | 3 Lokasi  | 2.400.000.000,00         | 4.200.000.000,00         | 4.197.226.000,00         | 1.797.226.000,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                  | 1.650.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    |      |
| 1.04.05.2.01.0003  |      | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan |   |                                  |  |  |  |           |                          |                          |                          |                             |  |                              |           |  |                  |                                  |                     |                                   |      |
|                    |      |  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan |                                  |  |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 150.000.000,00           | 150.000.000,00           | 141.496.000,00           | -8.504.000,00               | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas |                  |                                  | 65.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    |      |
| <b>J U M L A H</b> |      |  |   |                                  |  |  |  |           | <b>35.735.932.000,00</b> | <b>38.735.932.000,00</b> | <b>38.097.682.480,00</b> | <b>2.321.650.490,00</b>     |  |                              |           |  |                  | <b>32.640.796.136,00</b>         |                     |                                   |      |

Balikpapan, 05 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KOTA BALIKPAPAN**



**RAFIUDDIN**

| REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN 2024 |   |                   |                   |                                   |   |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                   |   |                   |                   |                                   |   |
|   | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SELISIH PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) | KETERANGAN  |
|   | <b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>   | Rp 11.385.000.000 | Rp 11.331.020.000 | Rp (53.980.000)                   |   |
|   | <b>1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                   | Rp 225.000.000    | Rp 225.000.000    | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana  | Rp 75.000.000     | Rp 75.000.000     | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   | Rp 100.000.000    | Rp 100.000.000    | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                    | Rp 50.000.000     | Rp 50.000.000     | Rp -                              |   |
|   | <b>1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>   | Rp 335.000.000    | Rp 335.000.000    | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana          | Rp 100.000.000    | Rp 100.000.000    | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator  | Rp 75.000.000     | Rp 75.000.000     | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                               | Rp 60.000.000     | Rp 60.000.000     | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                    | Rp 100.000.000    | Rp 100.000.000    | Rp -                              |   |
|   | <b>1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                            | Rp 1.575.000.000  | Rp 1.575.000.000  | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana  | Rp 1.000.000.000  | Rp 1.000.000.000  | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota  | Rp 100.000.000    | Rp 100.000.000    | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota                                    | Rp 475.000.000    | Rp 475.000.000    | Rp -                              |   |
|   | <b>1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>  | Rp 6.500.000.000  | Rp 6.486.510.000  | Rp (13.490.000)                   |   |
|   | 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun   | Rp 4.500.000.000  | Rp 4.500.000.000  | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  | Rp 2.000.000.000  | Rp 1.986.510.000  | Rp (13.490.000)                   | Pengurangan=Belanja Laptop Administrasi dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya) |
|   | <b>1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>  | Rp 2.650.000.000  | Rp 2.609.510.000  | Rp (40.490.000)                   |   |
|   | 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | Rp 50.000.000     | Rp 50.000.000     | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                     | Rp 2.500.000.000  | Rp 2.459.510.000  | Rp (40.490.000)                   | Pengurangan = belanja Laptop (2 unit) dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)   |
|   | 1.04.02.2.06.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | Rp 100.000.000    | Rp 100.000.000    | Rp -                              |   |
|   | <b>1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>  | Rp 100.000.000    | Rp 100.000.000    | Rp -                              |   |
|   | 1.04.02.2.07.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)                                | Rp 100.000.000    | Rp 100.000.000    | Rp -                              |   |
|   | <b>1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>   | Rp 10.400.000.000 | Rp 3.547.183.700  | Rp (6.852.816.300)                |   |
|   | <b>1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>   | Rp 45.000.000     | Rp 45.000.000     | Rp -                              |   |
|   | 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman  | Rp 45.000.000     | Rp 45.000.000     | Rp -                              |   |
|   | <b>1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>                   | Rp 1.375.000.000  | Rp 921.400.000    | Rp (453.600.000)                  |   |

| 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SELISIH PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) | KETERANGAN  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| 1.04.03.2.02.0004 Penyelesaian Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh   | Rp 1.100.000.000  | Rp 646.400.000    | Rp (453.600.000)                  | Pengurangan=Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan / Tenaga Pendamping Kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kota Balikpapan sebanyak 6 orang   |
| 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh  | Rp 85.000.000     | Rp 85.000.000     | Rp -                              |   |
| 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh   | Rp 190.000.000    | Rp 190.000.000    | Rp -                              |   |
| <b>1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>                               | Rp 8.980.000.000  | Rp 2.580.783.700  | Rp (6.399.216.300)                |   |
| 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   | Rp 7.240.000.000  | Rp 867.357.100    | Rp (6.372.642.900)                | Pengurangan=Bantuan Sosial Berupa Bahan Bangunan untuk Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Balikpapan semula 258 unit menjadi 15 unit dialihkan ke sub kegiatan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha |
| 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                     | Rp 50.000.000     | Rp 50.000.000     | Rp -                              |   |
| 1.04.03.2.03.0011 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh   | Rp 335.000.000    | Rp 308.426.600    | Rp (26.573.400)                   | Pengurangan=belanja Printer Inkjet dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)  |
| 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Rp 200.000.000    | Rp 200.000.000    | Rp -                              |   |
| 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh   | Rp 1.155.000.000  | Rp 1.155.000.000  | Rp -                              |   |
| <b>1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>   | Rp 4.550.000.000  | Rp 4.448.805.600  | Rp (101.194.400)                  |   |
| <b>1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>   | Rp 4.550.000.000  | Rp 4.448.805.600  | Rp (101.194.400)                  |   |
| 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan   | Rp 200.000.000    | Rp 110.083.600    | Rp (89.916.400)                   | Pengurangan=belanja modal laptop, PC Desktop, Hardisk Eksternal, Printer Inkjet dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)   |
| 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                         | Rp 4.200.000.000  | Rp 4.197.226.000  | Rp (2.774.000)                    | Pengurangan=belanja modal hardisk eksternal dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)   |
| 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan                 | Rp 150.000.000    | Rp 141.496.000    | Rp (8.504.000)                    | Pengurangan= belanja modal Kamera DSLR dialihkan ke sekretariat (sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)  |

| 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SELISIH PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) | KETERANGAN  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH   | Rp -              | Rp 6.818.600.000  | Rp 6.818.600.000                  | Penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan baru berdasarkan Telaahan Staf Kepala Disperkim Kota Balikpapan kepada Walikota Balikpapan nomor 891.1/0030/E/Disperkim tanggal 22 Januari 2024 Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun 2024.  |
| 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota  | Rp -              | Rp 6.818.600.000  | Rp 6.818.600.000                  |   |
| 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |                   | Rp 6.365.000.000  | Rp 6.365.000.000                  | Penambahan=dari sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk 242 Unit Bantuan untuk RTLH di Luar Kumuh ke Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Baru di luar Kawasan Kumuh, serta Tambahan Makan Minum Sosialisasi, dan Pendataan dan verifikasi RTLH se Kota Balikpapan (untuk CPB tahun 2025), |
| 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh   |                   | Rp 453.600.000    | Rp 453.600.000                    | Penambahan=untuk Honor TFL Pendamping LKM (Kota Kita) diluar Kawasan Kumuh sebanyak 6 Orang   |
| 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Rp 12.400.932.000 | Rp 11.911.973.150 | Rp (488.958.850)                  |   |
| 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Rp 7.303.263.550  | Rp 6.624.914.000  | Rp (678.349.550)                  |   |
| 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Rp 7.303.263.550  | Rp 6.624.914.000  | Rp (678.349.550)                  | Pengurangan=belanja gaji dan tunjangan (sisa lebih analisa ketercukupan gaji dan tunangan s.d Desember)   |
| 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Rp 480.892.500    | Rp 480.892.500    | Rp -                              |   |
| 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya   | Rp 30.892.500     | Rp 30.892.500     | Rp -                              |   |
| 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Rp 450.000.000    | Rp 450.000.000    | Rp -                              |   |
| 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Rp 851.560.050    | Rp 1.008.128.050  | Rp 156.568.000                    |   |
| 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Rp 16.980.000     | Rp 16.980.000     | Rp -                              |   |
| 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Rp 418.864.100    | Rp 418.864.100    | Rp -                              |   |
| 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Rp 112.283.950    | Rp 112.283.950    | Rp -                              |   |
| 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Rp 3.432.000      | Rp -              | Rp (3.432.000)                    | Pengurangan dialihkan ke belanja sppd sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |
| 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Rp 250.000.000    | Rp 410.000.000    | Rp 160.000.000                    | Penambahan: pergeseran penambahan dari belanja honorarium dan BPJS tenaga non PNS dan belanja koran dan beanja modal peralatan kantor (2 orang)   |
| 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Rp 50.000.000     | Rp 50.000.000     | Rp -                              |   |
| 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Rp 267.476.000    | Rp 351.812.000    | Rp 84.336.000                     |   |
| 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel  | Rp 43.603.000     | Rp 43.603.000     | Rp -                              |   |
| 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rp 223.873.000    | Rp 308.209.000    | Rp 84.336.000                     | Penambahan= belanja modal peralatan kantor dari sub kegiatan di bidang-bidang   |
| 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Rp 936.375.600    | Rp 880.365.600    | Rp (56.010.000)                   |   |
| 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Rp 170.000.000    | Rp 170.000.000    | Rp -                              |   |
| 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Rp 766.375.600    | Rp 710.365.600    | Rp (56.010.000)                   | Pengurangan= belanja honorarium tenaga non PNS dan BPJS (2 orang) dialihkan ke belanja SPPD   |
| 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Rp 2.561.364.300  | Rp 2.565.861.000  | Rp 4.496.700                      |   |

| 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  | SEBELUM PERUBAHAN        | SETELAH PERUBAHAN        | SELISIH PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) | KETERANGAN  |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 349.931.600           | Rp 349.931.600           | Rp -                              | Pergeseran = penambahan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 4 dan Pergantian Suku Cadang Roda 4 (esselon II) dari pengurangan belanja Pergantian Suku Cadang Roda 4 dan Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 |
| 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Rp 119.719.300           | Rp 124.216.000           | Rp 4.496.700                      | Penambahan=Belanja Pembayaran Pajak kendaraan operasional roda 4  |
| 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rp 95.425.800            | Rp 95.425.800            | Rp -                              |   |
| 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Rp 1.996.287.600         | Rp 1.996.287.600         | Rp -                              |   |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp 38.735.932.000</b> | <b>Rp 38.057.582.450</b> | <b>Rp (678.349.550)</b>           |   |


  
 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
 KOTA BALIKPAPAN  
 DINAS PERUMAHAN  
 DAN PERMUKIMAN  
 RAFI UDDIN